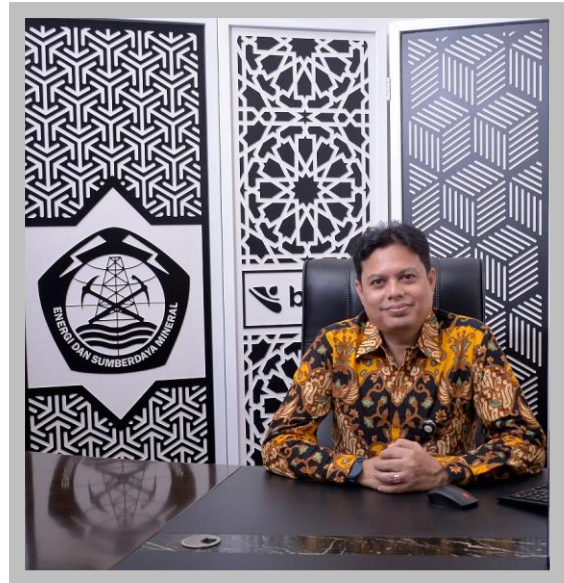




LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Migas Aceh Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik. Laporan Kinerja Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA") disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di wilayah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis BPMA Tahun 2020-2024.



Laporan Kinerja BPMA Tahun 2023 merupakan langkah yang diambil untuk secara rutin melaporkan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan aktivitas eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah tersebut, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian dari sasaran strategis yang telah disepakati sejak awal Tahun Anggaran 2023. Laporan ini juga merupakan tahap keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Migas Aceh Tahun 2020-2024. Secara sederhana, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan berfungsi sebagai instrumen penilaian kinerja serta sarana transparansi dan pertanggungjawaban kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM"), Gubernur Aceh, dan masyarakat. Melalui Laporan Kinerja, BPMA menjelaskan pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPMA Tahun 2023 yang mencakup 7 (tujuh) Sasaran Program dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama ("IKU").

Kinerja BPMA Tahun 2023 dievaluasi berdasarkan kemampuan mencapai sasaran strategis yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pencapaian kinerja pada Tahun 2023 mencapai 111,69% dari target yang telah disepakati pada awal tahun. Dibandingkan dengan rata-rata pencapaian Tahun 2022 sebesar 104,47%, rata-rata pencapaian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,2%.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja BPMA Tahun 2023 ini, diharapkan akan terjadi peningkatan peran lembaga dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh staf dan pelaksana di BPMA di masa depan.

Banda Aceh, 26 Februari 2024

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Teuku Mohamad Faisal

Laporan Kinerja Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA") menyajikan ringkasan pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPMA. Pencapaian ini mencerminkan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran BPMA, pencapaian indikator kinerja utama BPMA, penjelasan yang memadai tentang pencapaian kinerja, dan perbandingan antara capaian indikator kinerja Tahun 2023 dengan target yang direncanakan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut guna mencapai kinerja yang optimal.

BPMA adalah sebuah Badan Pemerintah di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") yang bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") dan Gubernur Aceh. Pembentukan BPMA dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh ("PP No. 23 Tahun 2015") untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sesuai dengan Pasal 13 dari PP No. 23 Tahun 2015, BPMA memiliki tugas utama untuk melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di Tahun 2023, beberapa perkembangan signifikan telah terjadi di wilayah kewenangan Aceh terkait industri hulu migas. Seiring dengan penambahan tiga Wilayah Kerja ("WK") Baru, yakni Offshore North West Aceh (Meulaboh), Offshore South West Aceh (Singkil), dan Bireun Sigli, jumlah WK minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh telah mencapai 7 (tujuh) WK. Proses penandatanganan WK baru juga memberikan penambahan PNBPN dari Signature Bonus sebesar US\$1.100.000.

Kegiatan utama hulu migas wilayah Aceh pada tahun 2023 mencakup berbagai aspek penting, termasuk pemboran sumur eksplorasi A-55A di Lapangan Arun Overburden, serta survei seismik 3D seluas 250 km² di Lapangan Arun Overburden dan Rayeu, WK "B". Tercatat juga realisasi biaya operasi mencapai 53% dari persetujuan anggaran pada RKA sebesar US\$170,65 Juta biaya operasi untuk WK Eksploitasi, serta realisasi biaya operasi WK Eksplorasi sebesar US\$7,28 Juta.

Produksi migas tahun 2023 mencapai 18.222 BOEPD dengan persentase ketercapaian hingga 99,69% dari target yang telah disepakati sebesar 18.278 BOEPD. Penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi yang mencapai US\$14,96 Juta, melampaui dari target yang ditetapkan di angka US\$14,52 Juta.

Pencapaian kinerja BPMA menunjukkan kinerja yang cukup baik dan efektif, hal ini dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja BPMA selama tahun 2023 sebesar 111,69%, yang merupakan hasil perata-rataan dari 10 Indikator Kinerja Utama, antara lain:

SASARAN STRATEGIS BPMA 2023	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PERJANJIAN KINERJA (PK) BPMA TAHUN	SATUAN	Target Restra	Target PK 2023	Realisasi s/d Des 2023	Realisasi vs Target	Keterangan
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Persentase <i>Reserves Replacement Ratio</i> untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	%	52	1	111	100,00%	1. Terdapat perubahan konsep pemodelan reservoir pada pengembangan lapangan ARAS Fase 2 Blok A, dimana memberikan hasil matching yang lebih baik, juga menghasilkan forecast produksi yang lebih optimis. 2. Perbedaan dengan target Renstra karena terdapat perubahan strategi explorasi dan pengembangan lapangan di WK "B", WK Blok "A", WK Pase dan WK Andaman III
	Produksi Minyak & Gas Bumi	BOEPD	21.961	18.278	18.222	99,69%	1. Nilai produksi lebih rendah dari target PK diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain mundur nya kegiatan workover acid fracturing di sumur AS-12 dan terjadinya unplanned shutdown fasilitas produksi. 2. Perbedaan dengan target Renstra karena terdapat perubahan strategi explorasi dan pengembangan lapangan di WK "B", WK Blok "A", WK Pase dan WK Andaman III
	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi	US\$/BOE	12	17	15,98	106,00%	1. Nilai realisasi tersebut lebih rendah dari nilai target ambang batas yang ditetapkan sebelumnya di angka 17 US\$/BOE, atau dengan capaian 106%. Perhitungan realisasi lifting cost ini didasarkan pada data FQR Q4 2023. 2. Perbedaan dengan target Renstra karena terdapat perubahan strategi explorasi dan pengembangan lapangan di WK "B", WK Blok "A", WK Pase dan WK Andaman III yang menyebabkan perubahan perencanaan anggaran investasi di WK tersebut
	Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	%	55	61	68,33	112,02%	TKDN pada Renstra menggunakan asumsi target nasional. Namun pada saat penyusunan PK target tersebut dikaji ulang berdasarkan pembahasan RKA bersama dengan KKKS
	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	Juta US\$	49,22	14,52	14,960	103,03%	1. Realisasi Penerimaan Negara di tahun 2023 berasal dari kegiatan komersialisasi minyak dan gas bumi dan Signature Bonus 3 WK baru. 2. Perbedaan dengan target Renstra karena terdapat perubahan strategi explorasi dan pengembangan lapangan di WK "B", WK Blok "A", WK Pase dan WK Andaman III
Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)	Skala 100	85	85	84,69	99,64%	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	<i>Incident Rate</i> Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	<i>Fraksi</i>	1	1,5	0,24	184,00%	Perbedaan dengan target Renstra karena terdapat perubahan strategi explorasi dan pengembangan lapangan
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan	%	90	90	95,12	105,69%	
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	Skala 100	93,5	93,5	94,42	100,98%	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai SAKIP BPMA	Skala 100	85	70	73,95	105,64%	BPMA baru memulai penilaian SAKIP pada tahun 2021 terhadap Realisasi Program Tahun Anggaran 2020. Target pada Renstra adalah target dengan mempertimbangkan nilai Renstra pada tingkat Kementerian.

Dalam hal serapan anggaran, realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp79.536.995.190,- atau sebesar 98,39% dari total pagu setelah revisi sebesar Rp80.836.323.000,-. Secara lebih rinci terkait penggunaan anggaran BPMA antara lain yaitu, 67,47% untuk mensupport kebutuhan Belanja Pegawai, 32,10% dimanfaatkan untuk Belanja Barang/Jasa, dan 0,43% untuk Belanja Modal.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, capaian Nilai Kinerja Anggaran tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Pengelolaan anggaran Tahun 2023 merupakan hasil kerja keras semua pihak di lingkungan BPMA serta kecermatan dalam menyikapi pagu anggaran yang diberikan. Dengan capaian kinerja mencapai 111,69% dan penggunaan anggaran mencapai 98,36%, dapat disimpulkan bahwa efektivitas BPMA dalam menggunakan anggaran yang diberikan masuk dalam kategori sangat baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	i
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Aspek Strategis	2
1.5 Struktur Organisasi	4
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)	9
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)	10
2.3 Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024.....	10
2.4 Rencana Strategis Badan Pengelola Migas Aceh 2020-2024	12
2.5 Perjanjian Kinerja	12
2.6 Alokasi Anggaran	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
Rencana Program Kerja dan Anggaran Kegiatan Hulu Migas di Wilayah Aceh, serta Realisasi di Tahun 2023	18
Sasaran Program 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	20
a. Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	20
Aktivitas Eksplorasi migas wilayah aceh	22
Komitmen Pasti, Komitmen kerja, Komitmen Kerja Pasti dan Komitmen eksplorasi	25
b. Produksi Minyak & Gas Bumi.....	25
Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi	25
Program Operasi Produksi	27
Plant Availability	28
Kegiatan Penunjang Operasi	30
Pengawasan Dan Pengendalian Aspek Pertanahan, Perizinan, Pengamanan Operasi & Hubungan Kelembagaan	31
Pengawasan dan Pengendalian Program Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ...	33
c. Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi.....	43
Perencanaan & Realisasi Biaya Operasi Produksi kegiatan hulu migas wilayah Aceh	45
Pengawasan dan Pengendalian Aset Hulu Migas dan Proses Pengadaan.....	47

Pengawasan dan Pengendalian <i>Post Audit</i>	49
d. Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	50
Sasaran Program 2: Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	52
e. Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	52
kontribusi sektor hulu migas wilayah aceh pada penerimaan negara dari pajak	55
Dana Bagi Hasil Dan Tambahan Dana Bagi Hasil Dari Industri Hulu Migas Wilayah Aceh	55
Anggaran Abandonment & Site Restoration dan Pemanfaatan Bank Lokal	56
Rekomendasi Legalitas Komersialisasi	57
Sasaran Program 3: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	58
f. <i>Incident Rate</i> kecelakaan kerja kegiatan hulu migas	58
Sasaran Program 4: Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	61
g. Indeks Kualitas Perencanaan BPMA	61
Layanan Hukum	61
Layanan Data Dan Informasi	62
Sasaran Program 5: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	63
h. Persentase Pekerja BPMA Yang Memenuhi Kualitas Sesuai Porsi Jabatan	63
Sasaran Program 6: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	64
i. Nilai SAKIP BPMA	64
Sasaran Program 7: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	65
j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	65
3.2 Realisasi Anggaran	66
Analisa atas efisiensi sumber daya	68
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN 1	73
LAMPIRAN 2	75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	5
GAMBAR 2 PETA KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DI BPMA	6
GAMBAR 3 PETA WK MIGAS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH	18
GAMBAR 4 NILAI RESERVES DAN GGR MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH ACEH TAHUN 2023	21
GAMBAR 5 PETA WILAYAH KEGIATAN SEISMIC 3D LAPANGAN ARUN OVERBURDEN	23
GAMBAR 6 PETA WILAYAH KEGIATAN SEISMIC 3D LAPANGAN RAYEU	23
GAMBAR 7 GRAFIK REALISASI PRODUKSI KONDENSAT DAN GAS BUMI WILAYAH ACEH TAHUN 2018-2023	26
GAMBAR 8 GRAFIK REALISASI PRODUKSI KONDENSAT DAN GAS BUMI SEPANJANG TAHUN 2023	27
GAMBAR 9 GRAFIK REALISASI LIFTING KONDENSAT DAN SALES GAS SEPANJANG TAHUN 2023.....	28
GAMBAR 10 LPO SETIAP KKKS TERHADAP TARGET SEPANJANG 2023.....	29
GAMBAR 11 PENGAWASAN KEGIATAN TURN AROUND (TAR) WK "B"	30
GAMBAR 12 KOMPOSISI REALISASI ANGGARAN PPM 2023 PGE	35
GAMBAR 13 PENYERAHA BEASISWA BAGI KELUARGA KURANG MAMPU	36
GAMBAR 14 BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK KABUPATEN ACEH UTARA	37
GAMBAR 15 RUMAH DHUafa SEBELUM DAN SETELAH RENOVASI.....	38
GAMBAR 16 PENDAMPINGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI ACEH TIMUR	39
GAMBAR 17 PENYERAHAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN PT MEDCO E&P MALAKA DI ACEH TIMUR	40
GAMBAR 18 KOMPOSISI REALISASI ANGGARAN PPM 2023 PT MEDCO E&P MALAKA.....	41
GAMBAR 19 DIAGRAM KOMPOSISI REALISASI ANGGARAN PPM 2023 TPI	43
GAMBAR 20 PERBANDINGAN ANGGARAN PERSETUJUAN PADA RKA DAN REALISASI PADA FQR TAHUN 2023 KKKS EKSPLOITASI	46
GAMBAR 21 PERBANDINGAN ANGGARAN PERSETUJUAN PADA RKA DAN REALISASI PADA FQR TAHUN 2023 KKKS EKSPLORASI.....	46
GAMBAR 22 CAPAIAN KOMITMEN TKDN HULU MIGAS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH TAHUN 2023	52
GAMBAR 23 PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK PADA INDUSTRI HULU MIGAS ACEH	55
GAMBAR 24 PNBP MIGAS, PAJAK, DBH & TDBH MIGAS WILAYAH ACEH	56
GAMBAR 25 SAFE MAN-HOURS SEPANJANG TAHUN 2023 UNTUK KEGIATAN HULU MIGAS WILAYAH ACEH.....	58
GAMBAR 26 TRIR BPMA DAN SETIAP KKKS WILAYAH ACEH SEPANJANG TAHUN 2023	59
GAMBAR 27 TRIR SEPANJANG TAHUN 2023 UNTUK KEGIATAN HULU MIGAS WILAYAH ACEH	59
GAMBAR 28 PENGHARGAAN BIDANG K ₃ LL BAGI KKKS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH	60
GAMBAR 29 TARGET PERENCANAAN KEGIATAN ROTASI PEGAWAI DAN AKTUAL REALISASI DI TAHUN 2023	63
GAMBAR 30 PERBANDINGAN TARGET DAN AKTUAL REALISASI PADA KEGIATAN SERTIFIKASI/TRAINING PEGAWAI BPMA DI TAHUN 2023.....	63
GAMBAR 31 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA VS SERAPAN ANGGARAN BPMA DARI TAHUN 2019 S/D 2023.....	67
GAMBAR 32 USULAN, PAGU ANGGARAN DEFINITIVE DAN REALISASI ANGGARAN BPMA DARI TAHUN 2018 S/D 2023	68

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PERJANJIAN KINERJA BPMA TAHUN 2023.....	13
TABEL 2 ALOKASI ANGGARAN PADA SETIAP UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BPMA	14
TABEL 3 PEMBOBOTAN PADA SETIAP INDIKATOR KINERJA UTAMA BPMA	16
TABEL 4 KATEGORI DALAM PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	17
TABEL 5 PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	17
TABEL 6 WK AKTIF DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH.....	19
TABEL 7 KOMITMEN PASTI, KOMITMEN KERJA DAN KOMITMEN KERJA PASTI DI TAHUN 2023	25
TABEL 8 PERBANDINGAN REALISASI PRODUKSI 2022, TARGET PRODUKSI 2023 DAN REALISASI PRODUKSI 2023	26
TABEL 9 PLANT AVAILABILITY PADA SETIAP WK TAHUN 2023	28
TABEL 10 PERBANDINGAN AVAILABILITY DAN RELIABILITY UNTUK MAJOR EQUIPMENT TAHUN 2023.....	28
TABEL 11 IKHTISAR REALISASI ANGGARAN PPM TAHUN 2023 PGE	34
TABEL 12 IKHTISAR REALISASI ANGGARAN PPM TAHUN 2023 PT MEDCO E&P MALAKA.....	40
TABEL 13 IKHTISAR REALISASI ANGGARAN PPM TAHUN 2023 TPI.....	42
TABEL 14 PERBANDINGAN ANTARA NILAI USULAN VS KESEPAKATAN AFE TAHUN 2023	47
TABEL 15 FSA PADA KEGIATAN HULU MIGAS WILAYAH ACEH.....	48
TABEL 16 LAPORAN ASET HARTA BENDA MODAL (HBM) KKKS EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI TAHUN 2023.....	49
TABEL 17 IKHTISAR REALISASI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2023 – MINYAK BUMI/ KONDENSAT.....	53
TABEL 18 IKHTISAR REALISASI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2023 – GAS BUMI	54
TABEL 19 KOMPILASI HSE PERFORMANCE BPMA & KKKS WILAYAH ACEH TAHUN 2023.....	60
TABEL 20 PENILAIAN SAKIP BPMA TAHUN 2023.....	65
TABEL 21 PENILAIAN IKPA BPMA TAHUN 2023.....	65
TABEL 22 REALISASI ANGGARAN BELANJA BPMA TAHUN 2023 UNTUK SETIAP JENIS BELANJA.....	66
TABEL 23 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA SASARAN PROGRAM, SERTA ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA KEUANGAN DI TAHUN 2023	68
TABEL 24 ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI TAHUN 2023	69

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN**1.1 LATAR BELAKANG**

Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu prasyarat yang harus dinilai dengan tujuan akhir mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("KKN"). Oleh karena itu Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ("Permenpan RB No. 53 Tahun 2014") mewajibkan instansi pemerintah, dalam hal ini BPMA, untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran uang sudah dialokasikan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di wilayah Aceh, BPMA mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan pengawasan usaha hulu migas di wilayah Aceh, secara berkala, kepada Menteri ESDM dan Gubernur Aceh.

Tujuan Laporan Kinerja BPMA ini adalah sebagai alat kendali dan penilaian kinerja, serta sebagai wujud sikap akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi BPMA. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tahun berikutnya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
- d. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 126.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BPMA adalah Badan Pemerintah di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") yang bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") dan Gubernur Aceh. BPMA dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh ("PP No. 23 Tahun 2015") untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sesuai dengan Pasal 13 dari PP No. 23 Tahun 2015, BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, sebagaimana diatur di Pasal 14 dari dalam PP No. 23 Tahun 2015, bahwasanya dalam menjalankan tugas pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak Kerjasama kegiatan usaha hulu tersebut BPMA mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
- b. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. Mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu WK;
- d. Menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu WK yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri;
- e. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya;
- f. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap;
- g. Melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri dan Gubernur; dan
- h. Memberikan rekomendasi penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan

pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Dalam perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Kondisi demikian belum dapat mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi.

Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik. Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

Pengaturan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang tertuang dalam Undang-Undang ini merupakan wujud kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerja sama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh, salah satunya adalah pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi, diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, kemajuan kualitas pendidikan, dan pemanfaatan dana otonomi khusus yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh, dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah Aceh akan dikelola secara bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Aceh dengan membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama. Selanjutnya, Kontrak Kerja Sama dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam rangka pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di darat dan laut di wilayah Aceh dapat dilakukan jika

keseluruhan isi perjanjian Kontrak Kerja Sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai Kontrak Kerja Sama tersebut Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Kewenangan pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Undang-Undang tersebut merupakan wujud kepercayaan yang ikhlas dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di Aceh.

Isu strategis yang menjadi sorotan utama pada tahun 2023 adalah terkait dengan pengembangan dan implementasi teknologi CCS/CCUS. Dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim, pemerintah Indonesia mempercepat langkah-langkah dan persiapan strategis, dan BPMA juga turut aktif dalam menyusun regulasi untuk mendukung upaya-upaya pengurangan emisi karbon tersebut. Hasil dari pembahasan tersebut adalah kelahiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Keterlibatan BPMA dalam proses pembahasan ini tidak terlepas dari potensi pengembangan CCS/CCUS di wilayah Aceh, terutama di Lapangan Arun.

Di samping itu, isu strategis lainnya yang memunculkan perdebatan adalah terkait pengalihan sebagian wilayah kerja milik PT Pertamina EP yang terletak di Aceh. Meskipun wilayah tersebut berada di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), namun secara geografis termasuk dalam wilayah administratif Aceh. Menteri ESDM mengeluarkan surat pada tanggal 26 Mei 2023, Nomor T-463/MG.04/MEM.M/2023, perihal Pengalihan Pengelolaan Sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP di Wilayah Aceh kepada Badan Pengelola Migas Aceh. Surat tersebut memberikan lampu hijau untuk proses pengalihan pengelolaan sebagian wilayah kerja PT Pertamina EP di Aceh melalui mekanisme yang dikenal sebagai "carved out". Hal ini mencerminkan peran aktif pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu strategis hulu migas di wilayah Aceh.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dari PP No. 23 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Kepala Badan Pengelola Migas Aceh dapat menetapkan susunan organisasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri ESDM dan Gubernur Aceh. Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 126.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh diatur lebih lanjut terkait susunan organisasi BPMA yang terdiri atas Kepala, Komisi Pengawas dan Unsur Pelaksana.

Komisi Pengawas BPMA berjumlah tiga orang yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah, unsur Pemerintah Aceh dan unsur masyarakat. Berdasarkan Pasal 22 dari PP No. 23 Tahun 2015, Komisi Pengawas BPMA mempunyai tugas:

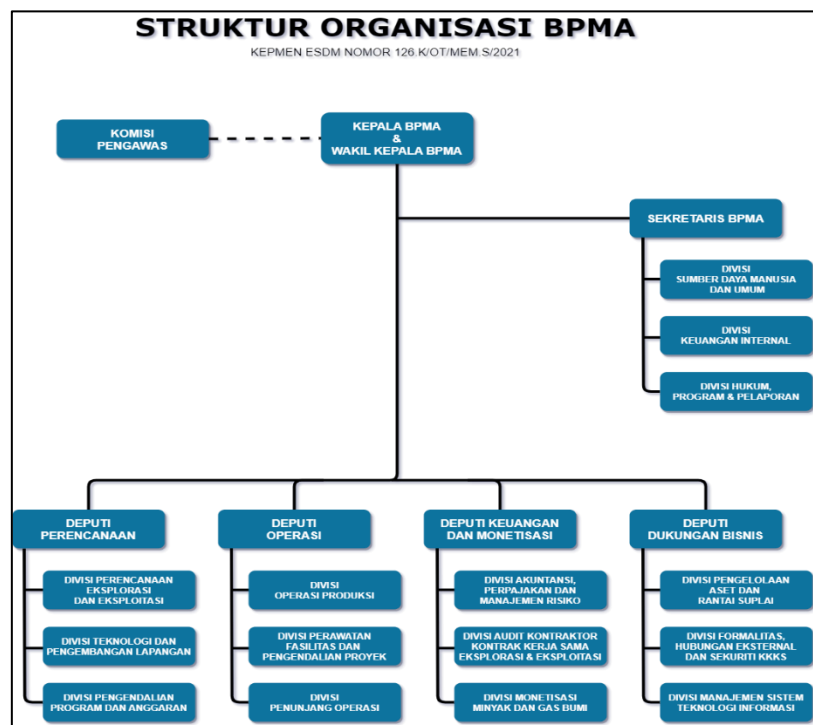
- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA;
- b. Melakukan penilaian atas kinerja Kepala BPMA;

- c. Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri melalui Gubernur atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA; dan
- d. Memberikan laporan kepada Menteri dan Gubernur mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau apabila diperlukan.

Unsur Pelaksana terdiri dari lima Unit Kerja yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis. Unit Kerja yang menjadi bagian dari Unsur Pelaksana di BPMA adalah:

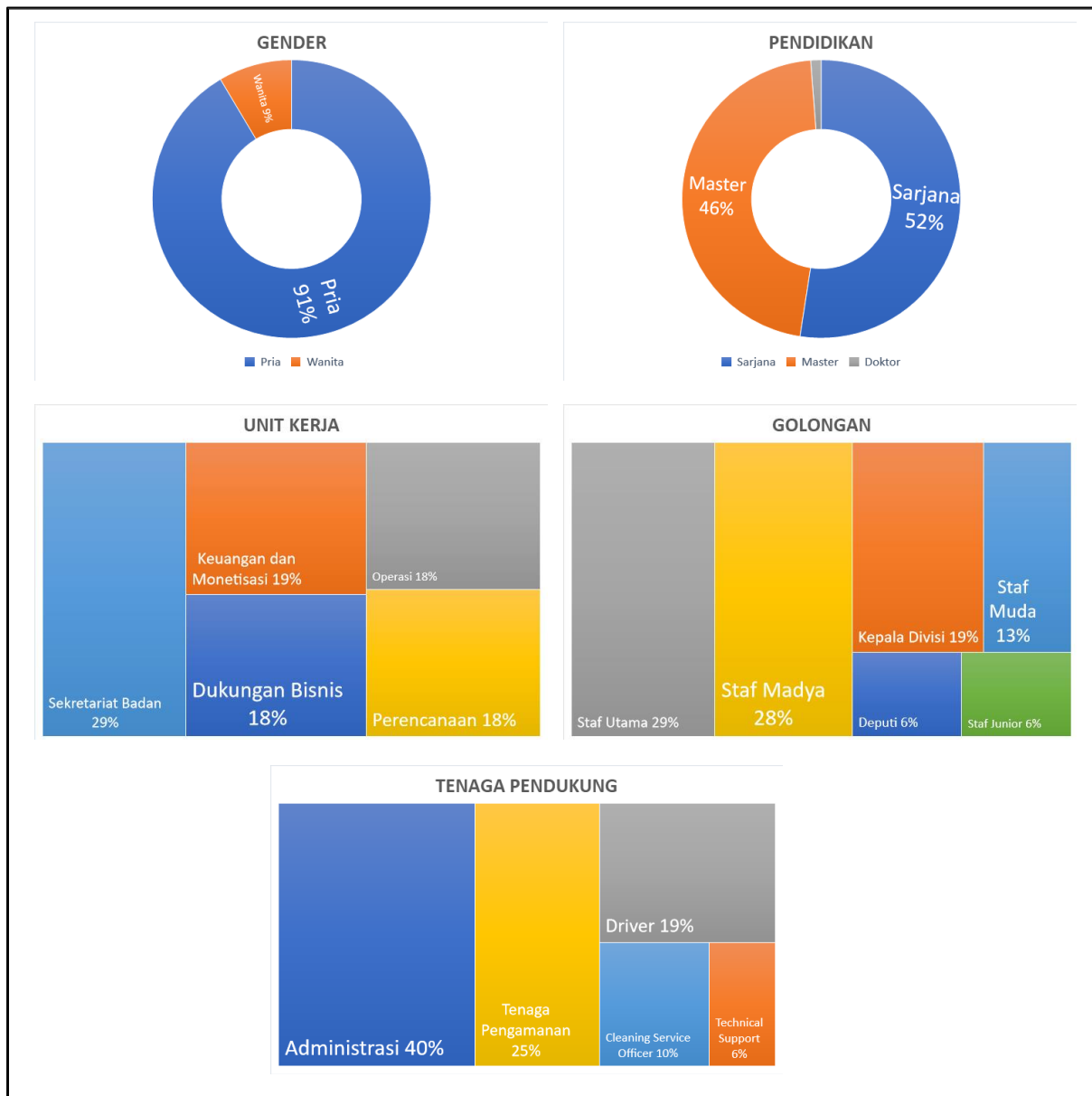
- a. Sekretaris BPMA, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Kepala BPMA meliputi urusan internal yang terkait dengan rencana kerja dan anggaran, keuangan, organisasi, personalia, hukum, program dan pelaporan, fasilitas kantor dan ketatausahaan;
- b. Deputi Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan serta pengelolaan perencanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, evaluasi dan pengembangan lapangan serta program dan anggaran di usaha hulu minyak dan gas bumi;
- c. Deputi Operasi, mempunyai tugas melaksanakan manajemen operasi produksi, perawatan fasilitas produksi, dan pengendalian proyek, serta pengendalian kegiatan penunjang operasi produksi;
- d. Deputi Keuangan dan Monetisasi, mempunyai tugas melaksanakan manajemen akuntansi, perpajakan, dan risiko, pemeriksaan keuangan operasi, serta monetisasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di wilayah kewenangan Aceh;
- e. Deputi Dukungan Bisnis, mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengelolaan aset dan rantai suplai, formalitas, hubungan eksternal, serta manajemen sistem informasi, dan teknologi informasi

Berikut di bawah ini adalah bagan struktur organisasi Badan Pengelola Migas Aceh:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Migas Aceh

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPMA didukung oleh 130 karyawan yang terdiri dari 82 pegawai tetap dan 48 karyawan kontrak. Berikut adalah tabel komposisi BPMA.



Gambar 2 Peta komposisi Sumber Daya Manusia di BPMA

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan PK, Lakin dan Reviu Lakin Instansi Pemerintah, sistematika Laporan Kinerja BPMA tahun 2023 juga mengakomodir poin-poin yang terdapat pada PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di wilayah Aceh, yaitu mengacu pada Pasal 17. Berikut adalah sistematika format Pelaporan Kinerja tahun 2023:

- Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian BPMA sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2023;

- b. Bab I Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan BPMA, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika pelaporan;
- c. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;
- d. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan kinerja yang telah dicapai oleh BPMA beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan anggaran. Selain itu pada Bab III ini juga akan melaporkan kinerja BPMA dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 PP Nomor 23 Tahun 2015;
- e. Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja;
- f. Lampiran, Perjanjian Kinerja BPMA Tahun 2023 dan tabel program kerja utama hulu migas di wilayah Aceh sesuai dengan persetujuan RKA 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan langkah krusial dalam pengelolaan instansi pemerintah yang memungkinkan penyusunan rencana kinerja sebagai rinciannya. Rencana ini merupakan elaborasi konkret dari sasaran dan program yang telah diamanahkan dalam rencana strategis. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, dimulai dari penetapan sasaran hingga pelaksanaan melalui serangkaian kegiatan tahunan. Dalam dokumen perencanaan kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan yang mencakup seluruh indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja tidak dapat dipisahkan dari agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Hal ini sejalan dengan komitmen instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan kinerja menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya dan alokasi anggaran, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki relevansi dan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis.

Sebagai salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan kinerja memegang peranan penting dalam menentukan arah dan fokus strategis instansi pemerintah. Dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam rentang waktu 1-5 tahun, perencanaan ini mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi unit organisasi. Selain itu, dokumen perencanaan kinerja juga senantiasa memantau dan menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis organisasi, sehingga dapat memberikan respons yang tepat terhadap dinamika yang terjadi.

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025, dimana menetapkan bahwa visi pembangunan yaitu mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Adapun visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah “Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa”. Dalam rangka mewujudkan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan yakni:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.3 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2020-2024

Rencana Strategis ("Renstra") adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam kesinambungan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan mengacu pada RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan arah dan kebijakan strategi pembangunan periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN dimana terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, KESDM mendukung setidaknya 5 (lima) Agenda Pembangunan terkait kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral dimana agenda-agenda tersebut antara lain:

- a. Agenda Pembangunan 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- e. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Demi tercapainya tujuan 5 (lima) Agenda Pembangunan tersebut, KESDM mempunyai visi untuk “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”, dan untuk mewujudkan visi tersebut maka misi KESDM yang akan dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
- c. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- d. Menjamin ketersediaan energi nasional;
- e. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
- f. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Sehingga dapat mencapai 4 (empat) tujuan KESDM yaitu:

- a. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
- b. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
- c. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
- d. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
- b. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral;
- c. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
- d. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;
- e. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- f. Layanan sektor ESDM yang optimal;
- g. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
- h. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
- i. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
- j. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- k. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
- l. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
- m. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

2.4 RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH 2020-2024

BPMA sebagai salah satu institusi di bawah KESDM menetapkan dokumen Renstra BPMA Tahun 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatannya. Renstra BPMA disusun untuk menjawab isu strategis yang menjadi tanggung jawab BPMA di wilayah kewenangan Aceh. Renstra BPMA merujuk dan mendukung 6 (enam) sasaran strategis pada renstra KESDM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut adalah 6 (enam) sasaran strategis BPMA sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan:

- a. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
- b. Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas wilayah kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
- c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif
- d. Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas
- e. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul
- f. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ("PK") adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

PK BPMA tahun 2023 merupakan penetapan kinerja tahun keempat dari Renstra BPMA 2020-2024. Dalam penyusunannya, PK BPMA tahun 2024 mengacu kepada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014. PK keempat Renstra ini ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kepala BPMA pada 27 Desember 2022:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja BPMA Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Persentase <i>Reserves Replacement Ratio</i> untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	%	1
	Produksi Minyak & Gas Bumi	BOEPD	18.278,04
	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi	US\$/boe	17
	Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	%	61
Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	Juta US\$	14,52
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	<i>Incident Rate</i> Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	Fraksi	1,5
Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)	Indeks	85
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan	%	90
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai SAKIP BPMA	Nilai	70
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	Skala 100	93,5

2.6 ALOKASI ANGGARAN

Mengacu pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa suatu instansi pemerintah menyusun PK setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima, yaitu paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Dalam perjalanannya suatu instansi dapat mengajukan revisi atau penyesuaian terhadap perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran, jika diperlukan.

Dalam menjalankan 7 (tujuh) Sasaran Program 2023, pagu anggaran BPMA Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp78,93 Miliar. Pagu anggaran tersebut kemudian mengalami revisi satu kali menjadi Rp80,84 Miliar. Adapun rincian alokasi anggaran BPMA tahun 2023 setelah revisi diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp54,54 Miliar atau 67,47%. Belanja Pegawai ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/pemangku kepentingan, antara lain: pembayaran gaji dan operasional perkantoran.
- b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp25,95 Miliar atau 32,10%. Belanja Barang/Jasa meliputi segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/pemangku kepentingan, antara lain pekerjaan kontraktual, belanja operasional perkantoran, swakelola dan pekerjaan kontraktual non tender.
- c. Belanja Modal sebesar Rp0,35 Miliar atau 0,43%.

Alokasi anggaran tersebut kemudian terbagi ke dalam 5 (Lima) Unit Kerja di lingkungan Badan Pengelola Migas Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Alokasi anggaran pada setiap Unit kerja di lingkungan BPMA

PROGRAM	SUB UNIT KERJA	ALOKASI ANGGARAN TA 2023	
		DIPA AWAL	PAGU REVISI
JA - Program Energi dan Ketenagalistrikan	Kedeputian Perencanaan	1.051.786.000	1.382.341.000
	Kedeputian Operasi	908.542.000	1.322.797.000
	Kedeputian Keuangan dan Monetisasi	1.016.292.000	2.094.908.000
	Kedeputian Dukungan Bisnis	300.000.000	385.333.000
WA - Program Dukungan Manajemen	Kedeputian Dukungan Bisnis	721.000.000	721.000.000
	Sekretariat BPMA	74.929.944.000	74.929.944.000
Total		78.927.564.000	80.836.323.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian tingkat capaian kinerja ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja suatu instansi pemerintah dalam menjalankan program-programnya, yaitu dengan mengetahui seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan di dalam PK. Berdasarkan SOP BPMA Nomor SOP-0002/BPMA0000/2020/Bo tentang Penilaian Pencapaian Kinerja Badan, pencapaian sasaran kinerja dihitung berdasarkan "Metode Pembobotan" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perhitungan persentase capaian untuk indikator dengan jenis semakin besar semakin baik (maximize), maka formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Perhitungan persentase capaian untuk indikator dengan jenis ambang batas (treshold), semakin kecil semakin baik (minimize), maka formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Masing-masing persentase capaian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mendapatkan nilai hasil pembobotan masing-masing indikator. Berikut adalah bobot untuk masing-masing indikator:

Tabel 3 Pembobotan pada setiap Indikator Kinerja Utama BPMA

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BOBOT (%)
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Persentase <i>Reserves Replacement Ratio</i> untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	15
	Produksi Minyak & Gas Bumi	15
	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi	5
	Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	15
Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	10
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	<i>Incident Rate</i> Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	10
Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)	5
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan	5
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai SAKIP BPMA	10
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	10
TOTAL		100

4. Nilai capaian keseluruhan Indikator Kinerja Utama BPMA merupakan penjumlahan dari nilai hasil pembobotan masing-masing indikator.

Penilaian setiap indikator kinerja menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran skala ordinal, yaitu:

Tabel 4 Kategori dalam pengukuran capaian kinerja

NO.	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	$X > 100 \%$	Sangat Efektif
2	$80 \% \leq X \leq 100 \%$	Efektif
3	$60 \% \leq X < 80 \%$	Cukup Efektif
4	$X < 60 \%$	Tidak Efektif

Berdasarkan penilaian sendiri (self-assessment), dapat disampaikan capaian kinerja BPMA pada tahun 2023, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, 6 (enam) diantaranya masuk kategori sangat efektif, 3 (tiga) lainnya dalam kategori efektif, dan sisa 1 (satu) dalam kategori cukup efektif. Berikut ini rincian target dan realisasi pencapaian kinerja BPMA berdasarkan Perjanjian Kinerja BPMA tahun 2023:

Tabel 5 Perbandingan antara target kinerja dan capaian kinerja tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023		REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (REALISASI VS TARGET) (%)	CAPAIAN SETELAH PEMBOBOTAN (%)
				RENSTRA	PK			
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	%	200	52	1	111*	100%	15%
	Produksi Minyak & Gas Bumi	BOEPD	20.373	21.961	18.278,04	18.222	99,69%	14,95%
	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi	US\$/boe	12,33	12	17	15,98	106%	5,30%
	Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	%	56,25	55	61	68,33	112,02%	16,80%
Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	Juta US\$	16,25	49,22	14,52	14,96**	103,03%	10,30%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	Fraksi	0,295	1	1,5	0,24	184%	18,40%
Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)	Indeks	85,01	85	85	84,69	99,64%	4,98%
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan	%	96	90	90	95,12	105,69%	5,28%

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai SAKIP BPMA	Nilai	70,4	85	70	73,95	105,64%	10,56%
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	Skala 100	95,73	93,5	93,5	94,42	100,98%	10,10%
Total Capaian Kinerja BPMA Tahun 2023								111,69%

*Capaian vs target RRR di angka 100%. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan untuk tidak mengganggu nilai rata-rata capaian total.

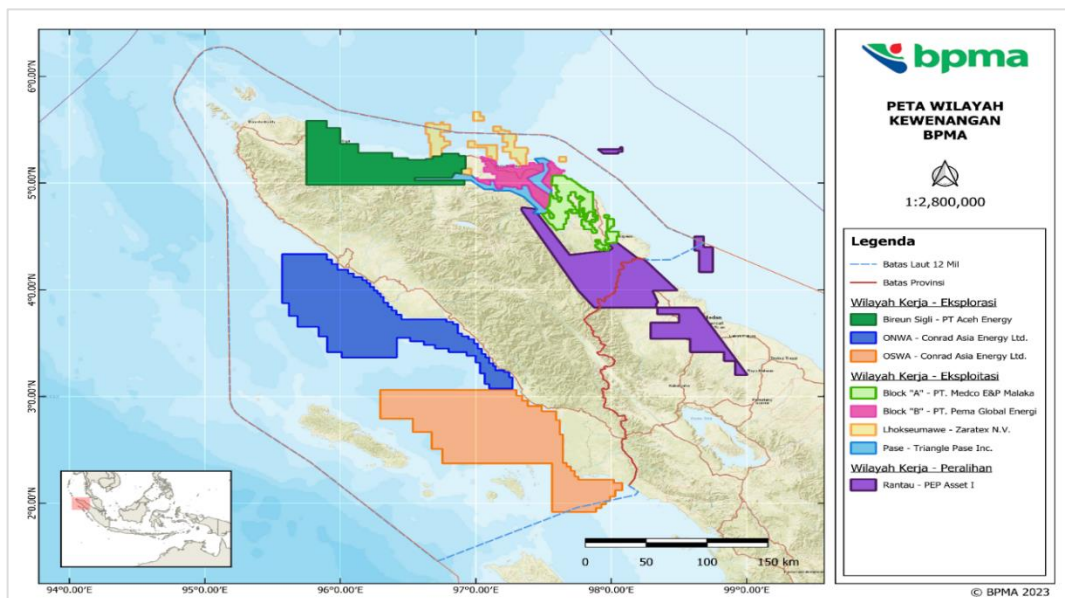
**Angka capaian Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas Wilayah Aceh pada tahun 2023 merupakan penjumlahan dari PNBP migas sebelum pengembalian keptwhole HGBT dan Signature Bonus 3 WK baru.

Jika dilihat dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, capaian sasaran program BPMA pada tahun 2023 adalah 111,69%. Capaian tersebut sedikit di atas capaian tahun 2022 di angka 104,47%. Capaian 2023 BPMA cukup memuaskan karena masih di atas angka 100% yang berarti masuk dalam skala ordinal Sangat Efektif, dan jika di uraikan untuk setiap indikator pada PK tersebut nilai capaian tahun 2023 di atas Tahun 2022, seperti capaian TKDN, Incident Rate Kecelakaan Kerja dan Nilai SAKIP BPMA. Hasil capaian yang tergambar dalam parameter tersebut diharapkan akan menjadi dasar peningkatan kinerja BPMA di tahun mendatang.

Berikut ini adalah analisis dan rincian kegiatan terhadap capaian kinerja BPMA pada tahun 2023:

RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN HULU MIGAS DI WILAYAH ACEH, SERTA REALISASI DI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, WK yang aktif di bawah pengawasan Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA") meliputi delapan WK, baik itu WK eksplorasi maupun eksploitasi.



Gambar 3 Peta WK Migas di wilayah kewenangan Aceh

Tabel berikut menyajikan deskripsi lebih rinci untuk setiap WK aktif di wilayah kewenangan Aceh:

Tabel 6 WK Aktif di wilayah kewenangan Aceh

No.	KONTRAKTOR	WILAYAH KERJA	JANGKA WAKTU	TANGGAL EFEKTIF	PARTISIPASI INTERES	STATUS
1	PT Medco E&P Malaka	Blok "A" Aceh	20 tahun	28 Oktober 2010	PT Medco E&P Malaka (85%) PT Medco Daya Energi Nusantara (15%)	Masih berlaku
2	PT Pema Global Energi	"B"	20 tahun	18 Mei 2021	PT Pema Global Energi (100%)	Masih berlaku
3	Triangle Pase Inc	Pase	20 tahun	22 Mei 2015	Triangle Pase Inc (100%)	Masih berlaku
4	Repsol Andaman B.V.	Andaman III	30 tahun	30-Nov-09	Repsol Andaman BV (51%) Petronas Andaman III Indonesia B.V. (49%)	Terminasi per 30 Juni 2023
5	Zaratex N.V.	Lhokseumawe	30 Tahun	07 Oktober 2005	Zaratex N.V (100%)	Masih berlaku
6	ONWA Pte Ltd	Offshore North West Aceh (Meulaboh)	30 Tahun	05 Januari 2023	ONWA Pte Ltd (100%)	Masih berlaku
7	OSWA Pte Ltd	Offshore South West Aceh (Singkil)	30 Tahun	05 Januari 2023	OSWA Pte Ltd (100%)	Masih berlaku
8	PT Aceh Energi	Bireun Sigli	30 Tahun	25 Juli 2023	PT Aceh Energi (100%)	Masih berlaku

Sebagaimana dapat dilihat pada table di atas, sepanjang tahun 2023 ini terdapat 3 (tiga) tambahan WK baru di wilayah kewenangan Aceh, antara lain WK Offshore North West Aceh (Meulaboh), Offshore South West Aceh (Singkil) dan Bireun-Sigli. Dari penandatanganan ketiga WK baru tersebut didapat penambahan PNBPN dari *Signature Bonus* secara berturut-turut sebesar US\$50.000, US\$50.000 dan US\$1.000.000.

Selain itu, kandidat WK baru yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan, yaitu berhubungan dengan alih kelola sebagian area milik Pertamina EP yang saat ini di bawah pengawasan SKK Migas dan terletak dalam wilayah teritorial Aceh, berdasarkan surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Nomor T-463/MG.04/MEM.M/2023 pada tanggal 26 Mei 2023 perihal Pengalihan Pengelolaan Sebagian WK Pertamina EP di wilayah Aceh kepada Badan Pengelola Migas Aceh. Melalui surat tersebut Menteri ESDM memberikan persetujuan untuk mengalihkan pengelolaan area tertentu dari WK Pertamina EP yang berlokasi di wilayah Aceh melalui mekanisme *carved out*.

Selain WK aktif yang telah dijabarkan sebelumnya, di atas 12 (dua belas) mil laut Aceh juga terdapat 3 (tiga) WK Eksplorasi, Andaman I, Andaman II dan South Andaman, juga terdapat 1 (satu) WK Eksploitasi, WK North Sumatera Offshore.

BPMA dalam melakukan pengawasan terhadap 8 WK aktif di tahun 2023 sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas melakukan pembahasan Rencana Kerja & Anggaran ("RKA") bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"). Setiap tahunnya, Persetujuan RKA bagi masing-masing

KKKS diberikan setelah menjalani serangkaian tahapan yang melibatkan pembahasan teknis dan analisis biaya. Proses ini biasanya dilaksanakan pada akhir tahun, mulai dari bulan Oktober hingga Desember, sebagai bagian dari upaya untuk merinci rencana kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan dalam tahun berikutnya.

Tahapan pembahasan teknis melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan operasional di WK baik itu kegiatan eksploitasi maupun kegiatan eksplorasi, termasuk rencana pengeboran sumur, kegiatan pemeliharaan, eksplorasi lanjutan, serta pengembangan infrastruktur. Selama tahap ini, semua detail operasional dikaji dengan seksama dan disesuaikan dengan tujuan jangka panjang dan target produksi yang telah ditetapkan. Program kerja setiap Wilayah Kerja hulu migas di wilayah Aceh dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan hulu migas di Wilayah Aceh di tahun 2023 ini, sesuai dengan hasil pembahasan RKA 2023 antara BPMA dan KKKS di Wilayah Aceh, dibutuhkan anggaran sebesar US\$170,65 Juta untuk Wilayah Kerja Eksploitasi, dan US\$4,89 Juta untuk Wilayah Kerja Eksplorasi. Dapat kami sampaikan bahwa hingga triwulan IV realisasi anggaran kegiatan hulu migas di Wilayah Aceh adalah sebesar US\$90,23 Juta untuk WK Eksploitasi, dan US\$7,28 Juta untuk WK Eksplorasi.

SASARAN PROGRAM 1: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Sedangkan ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Beberapa indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 1 antara lain:

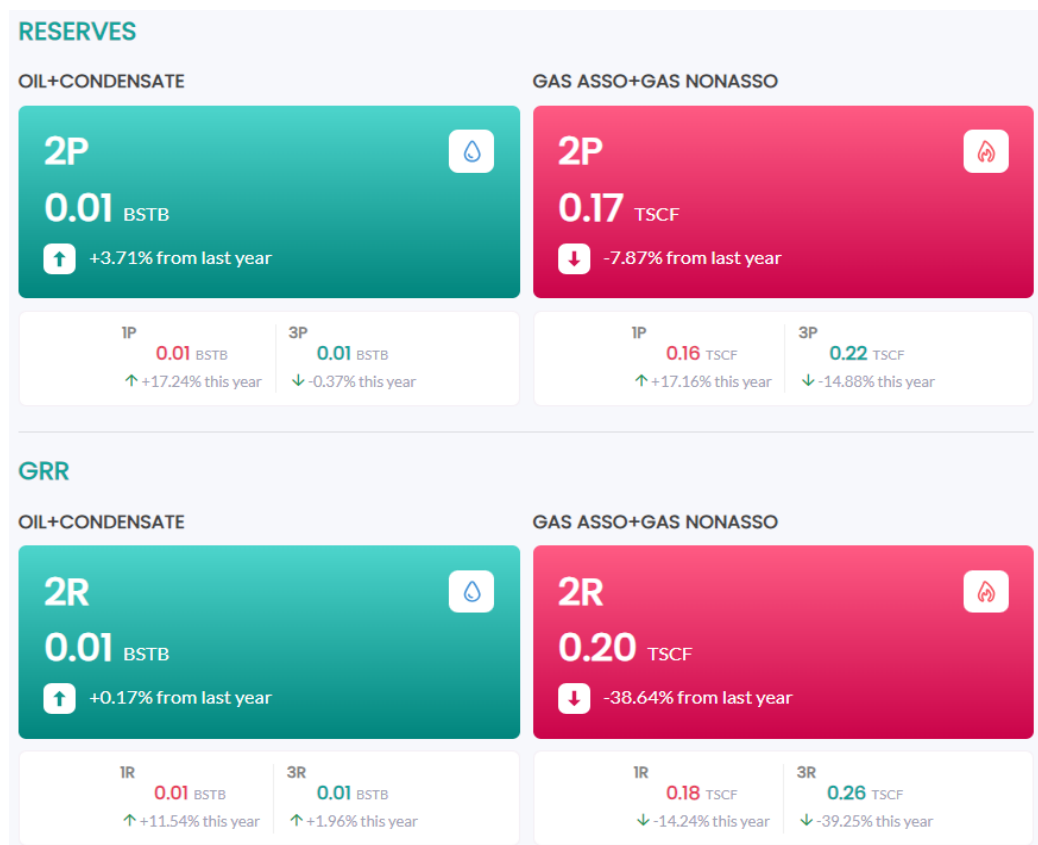
A. PERSENTASE RESERVES REPLACEMENT RATIO UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI WILAYAH KEWENANGAN ACEH.

Reserves Replacement Ratio ("RRR") adalah perbandingan penambahan cadangan terbukti terhadap lifting secara keseluruhan pada tahun tertentu. RRR selama ini digunakan sebagai indikator dalam melakukan monitoring terhadap kinerja perusahaan migas terkait kegiatan penambahan cadangan terbukti hingga dapat memperkirakan ketersediaan cadangan di masa depan, melakukan estimasi umur proyek, pendapatan perusahaan, dan lain-lain. Semakin besar nilai RRR maka semakin baik cadangan yang dimiliki oleh suatu negara yang menandakan kegiatan migas yang semakin banyak dan berumur panjang.

Di tahun 2023 realisasi nilai RRR migas di wilayah kewenangan Aceh adalah 111%, yang mana awalnya RRR tidak ditargetkan mengalami penambahan di tahun 2023 ini, diindikasikan dengan hanya 1% target RRR pada dokumen Perjanjian Kinerja BPMA Tahun 2023.

Dibandingkan dengan realisasi 2022 dengan RRR yang mencapai 200%, capaian RRR tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan di tahun 2022 penambahan nilai cadangan cukup signifikan berasal dari Project Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) Arun-SLS yang merupakan salah satu instrumen yang memberikan implikasi yang cukup signifikan dalam memperkirakan peningkatan cadangan suatu WK migas. Sedangkan pada tahun 2023, tidak ada penambahan cadangan yang dapat meningkatkan nilai RRR dari aspek studi pengembangan lapangan, namun demikian penambahan nilai cadangan berasal dari perubahan konsep pemodelan reservoir pada pengembangan lapangan ARAS Fase 2 WK Blok "A", dimana terdapat perubahan metode *rocktyping* yang menghasilkan *history matching* lebih baik dari model sebelumnya. Konsep pemodelan baru ini selain memberikan hasil *matching* yang lebih baik, juga menghasilkan *forecast* produksi yang lebih optimis. Jika dibandingkan dengan capaian indikator RRR secara nasional yakni 123,5%, penambahan RRR di wilayah Aceh masih belum dapat menunjang capaian secara nasional. Namun demikian angka tersebut tentu berimplikasi positif terhadap capaian nasional.

Berikut adalah data cadangan migas wilayah Aceh Waktu Acuan Pelaporan (WAP) 31 Desember 2022 yang disepakati tiga pihak pada tanggal 15 Agustus 2023:



Gambar 4 Nilai Reserves dan GRR minyak dan gas bumi di wilayah Aceh Tahun 2023

Indikator RRR merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kinerja eksplorasi di suatu WK migas. Indikator ini tidak akan mengalami peningkatan nilai jika

kegiatan eksplorasi tidak dilanjutkan ke tahap studi pengembangan lapangan. Terdapat banyak faktor yang menjadi pertimbangan KKKS dalam memutuskan dikembangkan atau tidaknya suatu lapangan.

AKTIVITAS EKSPLORASI MIGAS WILAYAH ACEH

Di tahun 2023 tidak terdapat studi pengembangan lapangan yang mendorong peningkatan nilai RRR wilayah Aceh, hanya terdapat perbaikan konsep pemodelan reservoir yang memberikan *forecast* produksi yang lebih optimis di WK Blok "A". Namun demikian upaya penemuan cadangan dan sumber daya baru untuk meningkatkan nilai RRR wilayah Aceh di masa yang akan datang terus dilakukan baik itu melalui kegiatan-kegiatan Studi G&G pematangan Lead Alur Baong, Drasip & Merbot Blok "A", pemboran sumur eksplorasi A-55A sampai tahap *well testing*, progress kegiatan akuisisi dan data processing seismik 3D lapangan Arun Overburden dan Rayeu seluas 250 km², Studi GGR WK "B" oleh Tim LAPI-ITB terhadap Lapangan Arun dan beberapa Lapangan yang akan eksplorasi, studi G&G WK Andaman III *sample analysis* sumur Rencong 1X, Studi GGR di WK Pase oleh LAPI ITB, Studi G&G secara *in-House* WK ONWA & OSWA dalam rangka pemenuhan Komitmen Pasti tahun pertama untuk memperkuat referensi dalam penentuan usulan lokasi seismik 3D.

Tercatat pada tahun 2023, BPMA telah melakukan beberapa kali pertemuan, pemaparan dan diskusi yang meliputi aspek data teknis terkait potensi eksplorasi migas Aceh, mekanisme dan regulasi industri migas di wilayah kewenangan Aceh, serta pembukaan data room bagi para calon investor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya: POSCO International (Korea Selatan), Indoasia Energi Persada (Indonesia), PT Pupuk Iskandar Muda (CCS/CCUS) terkait pemanfaatan Gas Bumi dan potensi CCS/CCUS WK "B".

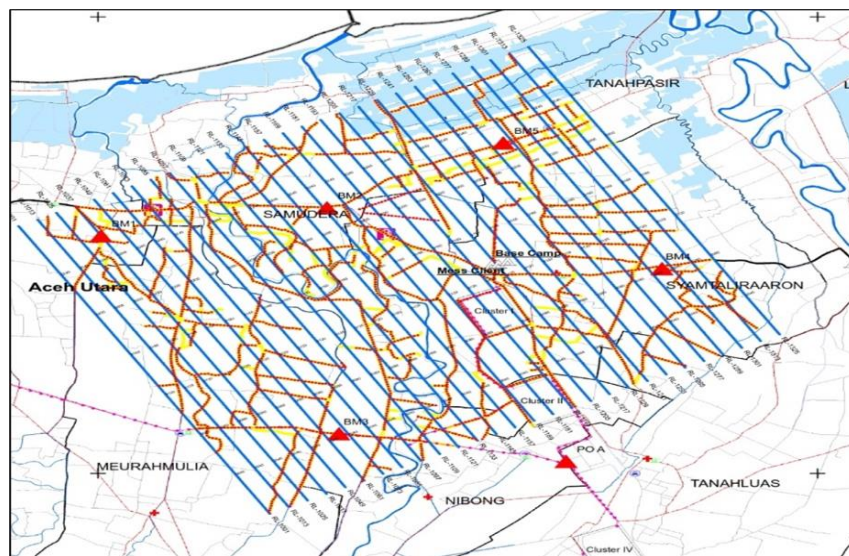
BPMA terlibat cukup intens dalam perencanaan dan pengawasan beberapa kegiatan eksplorasi hulu migas di tahun 2023. Beberapa program yang sudah dijalankan yang melibatkan baik itu Pemerintah, BPMA dan KKKS antara lain adalah:

1. Studi G&G Sample Analysis Sumur Rencong-1X oleh KKKS Repsol Andaman B.V. di WK Andaman III.

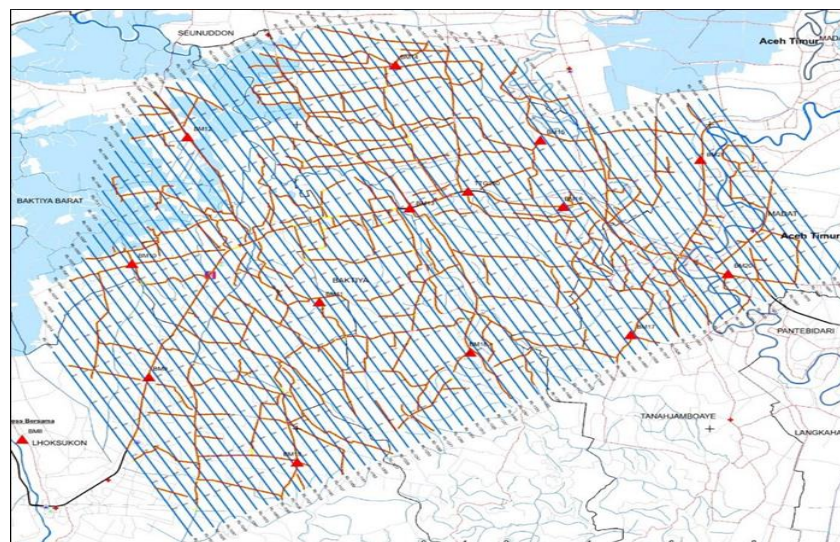
Pemboran sumur eksplorasi Rencong 1X dilakukan mulai tanggal 18 Juli 2022 (tajak) dan dinyatakan selesai pada tanggal 2 Oktober 2022 pada total kedalaman 4132 Meter MDRT. Sumur tersebut terletak di lepas pantai dengan kedalaman air laut 1103 meter yang merupakan kategori sumur Deep-water. Selanjutnya dilakukan studi *sample analysis* yang sudah rampung dilaksanakan tahun 2023. Tujuan dari studi tersebut terhadap hasil pengeboran eksplorasi Rencong-1X adalah:

- Mengetahui secara terperinci hasil dari pengeboran
- Memahami sifat dari penemuan
- Update volumetric prospek Rencong

- Menentukan keekonomian WK Andaman III
 - Sebagai landasan keputusan dan langkah yang akan diambil terhadap WK Andaman III
2. Studi Shallow Prospect Maturation Lapangan Drasip, alur Baong dan Merbot Oleh PT Medco E&P Malaka di WK Blok "A" yang bertujuan untuk mematangkan status lapangan-lapangan prospect dan lead demi menaikkan tingkatan status Sumber Daya. Program ini merupakan kelanjutan dari program yang sudah dilakukan sejak tahun 2022.
 3. Program lanjutan Akuisisi Seismik 3D lapangan Arun Overburden dan Rayeu oleh KKKS PT Pema Global Energi ("PGE") di WK "B". BPMA dan PGE merencanakan survei seismic 3D seluas 250 km² WK "B" di tahun 2022, berlanjut dan rampung dilaksanakan di bulan Juni tahun 2023. Kegiatan tersebut meliputi dua lapangan eksplorasi Arun Overburden (seluas 58 km²) & Rayeu (seluas 192 km²) di kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe.



Gambar 5 Peta wilayah kegiatan seismic 3D Lapangan Arun Overburden



Gambar 6 Peta wilayah kegiatan seismic 3D Lapangan Rayeu

4. Dukungan kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh dalam hal melanjutkan penetapan WK Bireun-Sigli, yang sudah tertunda sejak tahun 2012, kepada operator baru PT Aceh Energy.

5. Pemboran sumur eksplorasi Arun A-55A dan Studi Analisa Fluida WK "B".
6. Studi GGR WK "B" oleh LAPI ITB
Studi dilakukan terhadap Lapangan Produksi Arun & SLS dimana sudah masuk pada tahapan *history matching*. Selain Lapangan produksi, studi juga dilakukan terhadap lapangan-lapangan dengan status *discovery*, yaitu AOB, Cunda dan Rayeu.
7. Studi GGR WK Pase oleh LAPI-ITB
Studi dilakukan terhadap Lapangan dengan status POD, yaitu Pase A dan Pase B, dalam rangka melihat potensi-potensi yang mungkin terlewatkan dan untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, studi juga dilakukan terhadap lapangan-lapangan dengan status eksplorasi termasuk *oil shallow potential*.
8. Studi Geomekanik Blok "A" dalam rangka pemantapan rencana pemboran sumur di Alur Siwah dan rencana kegiatan re-acid fracturing dalam upaya optimasi produksi gas.
9. Studi G&G ONWA & OSWA dalam rangka memetakan potensi sumber daya (lead) dan penentuan area *3D seismic*.
10. Pembahasan teknis terkait usulan kegiatan additional SBHP Survey untuk sumur AS-9A WK Blok "A" KKKS PT Medco E&P Malaka.
11. Review secara komprehensif terkait *acid fracturing scenarios* pada sumur AS-12 yang akan di eksekusi pada Q1 2024 pada WK Blok "A".
12. Pembahasan teknis rencana pengeboran AS-14 dan AS-15 dan Pembangunan *mini-station* di Cluster-D guna peningkatan produksi di WK Blok "A".
13. Joint Study ("JS") Seuramoe
Kegiatan tersebut merupakan tahapan dalam Penawaran Langsung Wilayah Kerja di wilayah kewenangan Aceh yang dilakukan melalui studi Bersama antara KKKS Petronas bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Syiah Kuala yang berlokasi di daerah Lhokseumawe. Area Seuramoe adalah bagian dari PSC WK Lhokseumawe yang direlinguish oleh Zaratex, terdiri dari 20% area berada di darat (onshore) dan 80% area berada di laut (offshore). Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-11837/MG.04/DJM/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Persetujuan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama Wilayah Seuramoe, maka kegiatan JS Seuramoe dilaksanakan selama 8 bulan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2021 sampai 29 Agustus 2022. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Petronas mengajukan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan JS Seuramoe tersebut selama 4 bulan, dan dilakukan presentasi akhir pada 10 Januari 2023. Beberapa hasil dari kegiatan JS Seuramoe adalah sebagai berikut:
 - Komitmen JS yang telah dilaksanakan antara lain melakukan seismic poststack enhancement pada 165 km 2D seismic, membuat advance seismic attribute, survey geologi lapangan, dan melakukan Social Impact Assessment (SIA).
 - Teridentifikasi beberapa play di onshore dan offshore antara lain Upper Parapat, Bampo, Peutu, Baong, dan Keutapang yang merupakan Ologocene-Miocene play target. Total

terdapat 16 structural leads. Risiko utama (main risk) tersebut adalah pada keberadaan reservoir dan pengisian hidrokarbon.

- Berdasarkan Woodmac (Januari 2021), Minimum Economic Field Size (MEFS) untuk area tersebut adalah 1,2 TCF dengan asumsi harga gas USD 6/MMBTU.
- Dari hasil studi tersebut Petronas memutuskan untuk tidak melanjutkan JS Seuramoe menjadi Wilayah Kerja.

KOMITMEN PASTI, KOMITMEN KERJA, KOMITMEN KERJA PASTI DAN KOMITMEN EKSPLORASI

Di tahun 2023, terdapat empat WK Eksploitasi dan empat WK Eksplorasi di wilayah kewenangan Aceh. Khusus WK Blok "A", hanya dikenal dengan komitmen eksplorasi pemboran 2 (dua) sumur, dimana menyisakan kewajiban 1 (satu) sumur. Sedangkan 7 (tujuh) WK lainnya terdapat Komitmen Pasti ("KP"), Komitmen Kerja ("KK") dan/atau Komitmen Kerja Pasti ("KKP") dengan total nilai komitmen sebesar US\$291,25 juta (termasuk KP dan KKP di Andaman III yang terminasi pertengahan tahun 2023), di mana saat ini telah dan sedang terealisasi sebanyak 27 kegiatan. Khusus untuk tahun 2023 total KP, KK dan KKP yang telah dan atau sedang dikerjakan adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Komitmen Pasti, Komitmen Kerja dan Komitmen Kerja Pasti di tahun 2023

WILAYAH KERJA	PEKERJAAN	NILAI KOMITMEN (US\$)	KETERANGAN
WK "B"	Studi GGR	300.000	Komitmen Kerja Pasti Tahun ke-1
	Seismik 3D	8.000.000	Komitmen Kerja Pasti Tahun ke-2
ONWA OSWA Bireun-Sigli	Studi G&G	500.000 500.000 12.000.000	Komitmen Pasti Tahun ke-1

B. PRODUKSI MINYAK & GAS BUMI

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

BPMA terus mendorong KKKS di wilayah kewenangan Aceh agar dapat meningkatkan investasi dan menjalankan program kerja dalam upaya peningkatan produksi migas Aceh. Komitmen tersebut selaras dengan pencapaian target produksi migas Aceh di tahun 2023 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 8 Perbandingan realisasi produksi 2022, target produksi 2023 dan realisasi produksi 2023

	REALISASI 2022	WP&B 2023	REALISASI 2023
MINYAK, BOPD	2213	1889	1938
GAS, MMSCFD	101.70	89.11	91.19
MIGAS, BOEPD	20373	17803	18222

konversi 1 BOE = 5,6 MSCF

Realisasi produksi minyak dan gas bumi tahun 2023 mencapai 18.222 Barel Oil Ekuivalen per hari (BOEPD) atau 99,69% dari target yang ditetapkan di indikator kinerja yaitu pada angka 18.278 BOEPD. Begitu juga terhadap target Renstra 2023 dimana realisasi produksi migas 2023 lebih rendah dibandingkan dengan target Renstra 2023 di angka 21.961 BOEPD. Target Renstra menunjukkan angka lebih tinggi dikarenakan pada saat perencanaan Renstra produksi migas dari Blok "A" diprediksi masih cukup tinggi dimana aktualnya saat ini terjadi penurunan produksi kondensat yang lebih cepat dari perkiraan karena berhentinya produksi dari Lapangan Alur Rambung terkait problem keairan. Selain itu pada Renstra juga masih memperkirakan adanya sumbangan produksi dari POD Lapangan Pase-B WK Pase dan POD Lapangan Peusangan B WK Lhokseumawe.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 20.373 BOEPD, realisasi produksi di tahun 2023 menunjukkan penurunan sebanyak 2.151 BOEPD. Berikut adalah capaian produksi migas Aceh tahun 2018-2023:



Gambar 7 Grafik realisasi produksi kondensat dan gas bumi wilayah Aceh tahun 2018-2023

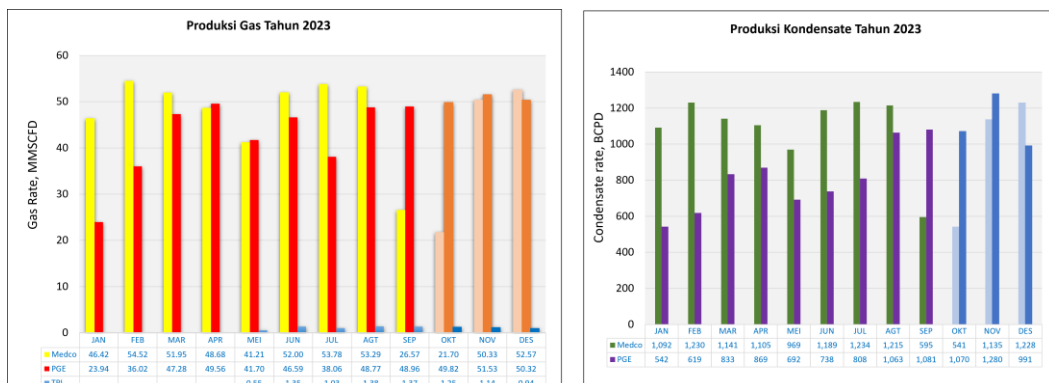
Jika dibandingkan dengan realisasi produksi secara nasional hingga November tahun 2023 adalah 1.617 MBOEPD, realisasi produksi migas wilayah Aceh tahun 2023 sebesar 1,13% dari produksi nasional, dimana produksi gas sebesar 1,6% dari produksi gas nasional 5.663 MMSCFD, dan Minyak/Kondensat sebesar 0,32% dari produksi nasional 605 MBOPD.

PROGRAM OPERASI PRODUKSI

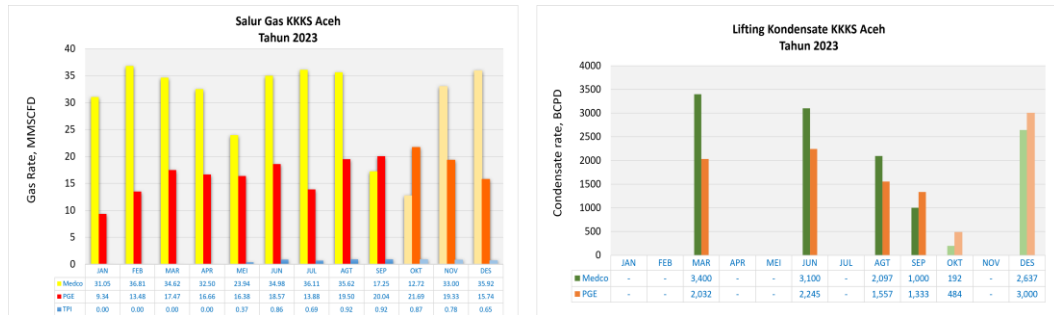
Dalam mendukung upaya mempertahankan laju produksi migas di wilayah Aceh tidak terlepas dari beberapa usaha yang dilakukan oleh KKKS dibawah pengawasan BPMA, antara lain:

1. Pengawasan penambahan titik serah baru Meter FI-1909 di Point B untuk penyaluran gas PHE NSO dan PGE kepada PAG dimana Commisioning dan Gas In mulai dilakukan pada 27 Juni 2023.
2. Alih kelola operatorship fasilitas kondensat (handling, storage dan lifting) di Point B dari PHE NSO kepada PGE pada tanggal 1 April 2023.
3. Penyelesaian Gas Delivery Procedure (GDP) antara PT Medco E&P Malaka dan PTGN sebagai agregator penyaluran gas WK Blok "A" ke PT PIM
4. Rekalibrasi dan Resertifikasi Orifice Gas Meter milik Triangle Pase Inc. ("TPI")
5. Penyelesaian Berita Acara Serah Terima (BAST) Tangki F-6104 antara PT Medco E&P Malaka dan LMAN
6. Pengawasan terhadap perbaikan/penggantian Condensate Loading Hose untuk kegiatan lifting
7. Finalisasi Condensate Delivery Procedure (CDP) dan Condensate Lifting Procedure (CLP) Terminal Arun Blang Lancang
8. Pengawasan program well monitoring SCADA untuk 45 sumur di Arun Cluster WK "B"
9. Pengawasan rencana perbaikan tangki F-6104 yang akan dilakukan oleh PT Pembangunan Aceh (PEMA)
10. Pengawasan perbaikan Pig Receiver di Point B

Berikut adalah grafik profil produksi dan lifting migas Aceh tahun 2023:



Gambar 8 Grafik realisasi produksi kondensat dan gas bumi sepanjang tahun 2023



Gambar 9 Grafik realisasi lifting kondensat dan sales gas sepanjang tahun 2023

PLANT AVAILABILITY

Dalam rangka menjaga produksi migas sesuai dengan target produksi yang telah ditetapkan, maka menjadi faktor penting untuk memperhatikan dan menjaga performa fasilitas produksi. Mengukur performa suatu fasilitas produksi dapat dimonitor dengan cara memperhatikan seberapa lama waktu suatu fasilitas produksi beroperasi dengan baik, kemudian juga ikut memperhatikan seberapa lama suatu fasilitas produksi berhenti beroperasi dikarenakan adanya permasalahan operasi. Kedua faktor tersebut kemudian dihitung dan dimonitor untuk menghasilkan suatu Plant availability yang baik. Untuk mencapai target produksi tahun 2023 maka ditargetkan *Plant Availability* sebesar 75% di wilayah kewenangan Aceh dengan realisasi masing-masing WK disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9 Plant Availability pada setiap WK tahun 2023

No	KKKS	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	AVG
1	PGE (WK B)	44,40	61	91,58	100	96,64	100	85,45	99,20	99,19	96,67	100	100	89,51
2	MEPM (BLOK A)	98,13	100	100	100	98,62	100	99,40	99,77	72,04	59,74	99,92	100	93,97
3	TPI (WK PASE)	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90

Dari tabel di atas terlihat plant availability yang rendah di bulan Januari s.d Februari 2023 untuk WK "B", hal ini merupakan dampak dari terjadinya kegagalan (*tripped*) peralatan PGT-502 & PGT-503. Kemudian penurunan plant availability juga terjadi di WK Blok "A" pada bulan September-Oktober 2023 yang merupakan kontribusi dari prolong kegiatan Turn Around (TAR).

Ketersediaan dan Kehandalan *Plant Availability* juga dipengaruhi oleh kinerja fasilitas produksi utama (*Major Equipment*) seperti *Power Generator*, *Booster Compressor*, *Booster/Transfer Pump*, *Water Injection Facility/Pump*, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap kelangsungan produksi pada KKKS tersebut. Oleh karena itu, dengan menjaga tingkat ketersediaan dan kehandalan fasilitas produksi, maka besarnya potensi kehilangan produksi yang diakibatkan oleh *downtime* pada fasilitas produksi dapat diminimalisir.

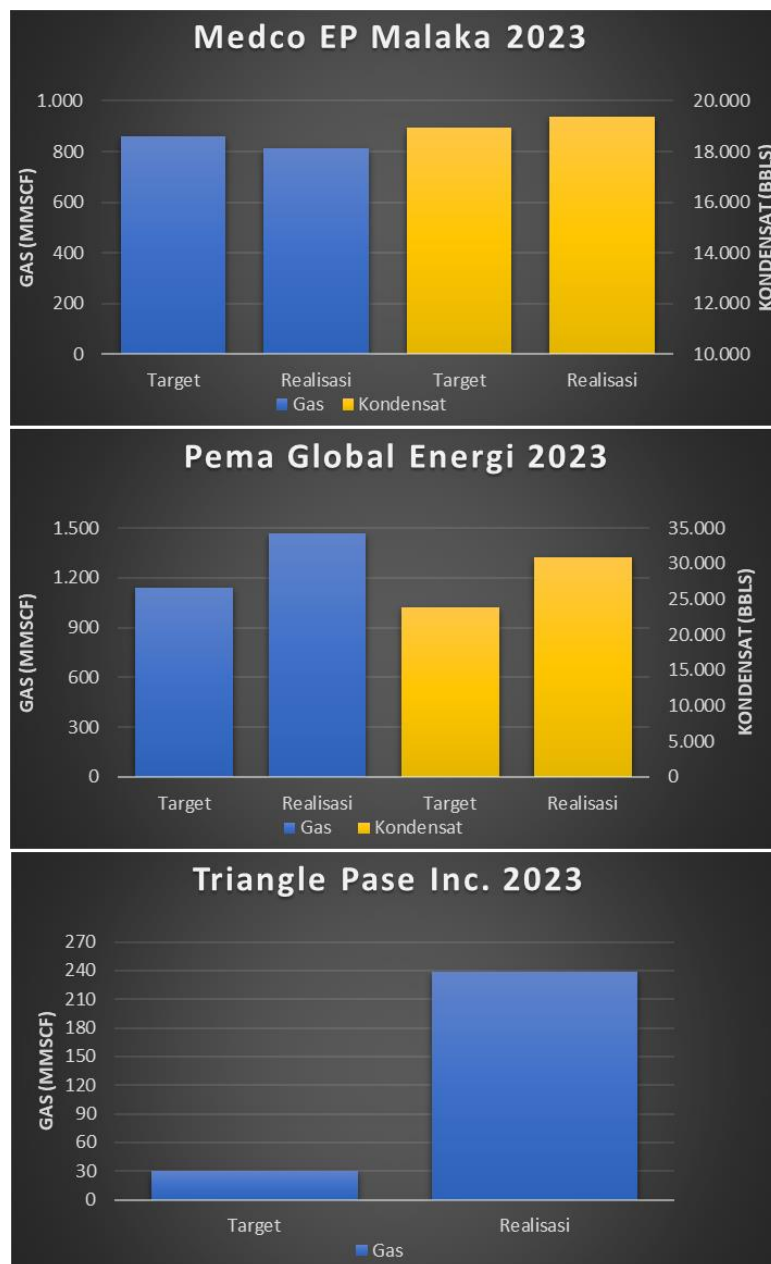
Tabel 10 Perbandingan Availability dan Reliability untuk Major Equipment tahun 2023

NO.	KKKS		MAJOR EQUIPMENT 2023												
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg
1	WK “B”	Availability (%)	81	87	97	100	98	100	94	99	99	98	100	100	96
		Reliability (%)	81	87	97	100	98	100	94	99	99	99	100	100	96

2	BLOK "A"	Availability (%)	99	86	89	99	99	94	100	100	99	100	99	98	97
		Reliability (%)	99	97	96	99	99	98	100	100	100	100	100	99	99
3	WK PASE	Availability (%)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		Reliability (%)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Target Produksi selain bergantung pada kondisi *subsurface* juga bergantung pada tingkat ketersediaan fasilitas produksinya. Oleh karena itu, dengan menjaga tingkat ketersediaan dan kehandalan fasilitas produksi, maka besarnya potensi kehilangan produksi atau LPO yang diakibatkan oleh fasilitas produksi menjadi berkurang.

Loss production Opportunity untuk masing-masing KKKS Produksi terhadap target dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 10 LPO setiap KKKS terhadap target sepanjang 2023

Dapat dijelaskan bahwa Realisasi LPO yang melebihi target pada PGE disebabkan oleh kegagalan peralatan PGT-503 dan KGT 4930. Kemudian Realisasi LPO yang melebihi target pada TPI disebabkan karena fasilitas PGE dan PHE NSO dalam kondisi *shutdown* untuk dilakukan maintenance.

Beberapa pengawasan terhadap fasilitas produksi yang dilakukan oleh BPMA dalam rangka menjamin keberlangsungan operasi-produksi di wilayah Aceh:

1. Pengawasan kegiatan *Tie-In Provision* di CPP Blok "A"
2. Pengawasan kegiatan Turn Around yaitu *improvement* AGRU & SRU Process dengan penggantian katalis
3. Pengawasan kegiatan pemeliharaan in-line inspection (ILI) pipa 30 inch *Cluster IV to Point A* & pipa 42 Inch *Point A to Point B* WK "B"
4. Pengawasan kegiatan pemeliharaan *Major Inspection* (MI) KGT 4920 di *Cluster* WK "B"
5. Pengujian kinerja peralatan (PKP) Fasilitas Produksi
6. Pengawasan Proyek Jasa Rental PLTMG, Rental Booster Compressor, Rental Gas *Processing Facility* kapasitas 45 MMSCFD di WK "B"
7. Pengawasan *Green Project* instalasi listrik PLN Blok "A"
8. Pengawasan proyek fasilitas produksi cluster D (AS-14) dan AS-15 Blok "A" yang merupakan komitmen pengembangan lapangan ARAS Fase 2



Gambar 11 Pengawasan kegiatan Turn Around (TAR) WK "B"

KEGIATAN PENUNJANG OPERASI

Selain kegiatan utama operasi produksi yang bersinggungan langsung dengan *performance* produksi migas di lapangan, beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan utama juga tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPMA di tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan penanganan longsor ROW di Lapangan Alur Siwah.
2. Pengawasan pekerjaan jembatan permanen Jambo Balee WK Blok "A".

3. Pengawasan perbaikan jembatan Peutoe River dan jalan ROW *pipeline* SLS Cluster D1, D2 dan SLS Cluster A ke Cluster IV di WK "B".
4. Pengawasan *site preparation Cluster* D (AS-12) dan Cluster AS-15 Blok "A".
5. Pengawasan *Drilling Site preparation* (DSP) WK "B" untuk kegiatan sumur eksplorasi A-55A dan A-72A di WK "B".
6. Pengawasan operasional Fasilitas Kantor, *Camp* dan *Catering* KKKS.
7. Monitoring kegiatan operasional kebandaran KKKS PT Medco E&P Malaka.
8. Monitoring operasional alat *transport light* dan *heavy vehicle* serta liability alat angkut dan angkut KKKS.
9. Pengawasan pemindahan titik serah Sulphur PT Medco E&P Malaka.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERTANAHAN, PERIZINAN, PENGAMANAN OPERASI & HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Kelancaran pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh tidak dapat dipisahkan dari dukungan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran dan pengaruh dalam kelancaran operasi produksi di wilayah kewenangan Aceh. Untuk mendapatkan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka BPMA melakukan beberapa tahapan untuk mencapai target tersebut diantaranya;

1. Diseminasi informasi terkait kegiatan hulu minyak dan gas bumi kepada *stakeholder* secara menyeluruh disertai dengan peran-peran stakeholder lainnya dalam mendukung kegiatan hulu migas;
2. Kunjungan kehormatan dilakukan kepada pemangku kepentingan utama untuk dapat memberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang pentingnya dukungan dari pemangku kepentingan utama demi kelancaran kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan kunjungan kepada pemangku kepentingan bersama KKKS sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan PT Telin terkait dengan koordinat jalur kabel dan peta jalur, serta data koordinat persilangan pada blok konsesi migas di Andaman III.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ("PKS") dengan BSSN dan berkoordinasi dengan internal Divisi MSTI untuk dimasukkan Bidang Kesekuritan.
3. Rapat Koordinasi dengan Kepala SUSMAR Ditjen Migas terkait Kebutuhan LO (Liaison Officer) untuk Pemboran Sumur Rencong 1X Repsol Andaman B.V.
4. Kunjungan Kehormatan ke Pangdam IM dalam rangka meminta dukungan untuk kelancaran operasi migas di WK "B" bersama KKKS PGE.
5. Penandatanganan PKS antara BPMA dan MABES TNI AD untuk Dukungan Penguatan Pembinaan Teritorial di WK Migas Aceh.

6. PKS Penguatan Pembinaan Teritorial di WK Aceh dengan MABESAD dan Membuat PKS dengan TNI AD untuk mendukung Penggalangan dalam rangka kelancaran kegiatan operasi hulu migas.
7. Dukungan Pengamanan melalui MOU dengan Polda Aceh dengan menempatkan Pamobvitnas Polda Aceh di PT Medco E&P Malaka dan PGE.
8. Koordinasi Kerjasama Teritorial dengan Kementerian Lembaga dan Non Kementerian Lembaga untuk tahun anggaran 2023.
9. Penandatanganan Pedoman Kerja Teknis ("PKT") Pengamanan Khusus antara BPMA dengan Polda Aceh untuk WK Blok "A" dan WK "B".
10. Monitoring dan Evaluasi Semester I dan II untuk PKT Pamsus Obvitnas Polda Aceh dengan KKKS.
11. Sosialisasi Penguatan Binter dan Komsos di Jajaran Bawah mulai KODAM IM, Korem Lilawangsa dan Kodim Aceh Utara dan Aceh Timur oleh Mabes TNI AD.
12. Diskusi Teknis dan Survey Lapangan yang ditujukan ke Dansat Brimob Polda Aceh dalam memitigasi dampak sosial terkait Pekerjaan Perawatan Pipa di Jalur Row sampai CPP (Central Processing Plant).

Disamping itu BPMA juga melakukan pendampingan bagi SKK Migas terkait dengan kegiatan hulu migas di atas 12 mil laut Aceh terutama untuk melakukan sosialisasi dan *courtesy visit* kepada para pemangku kepentingan yang dilakukan oleh SKK Migas dan Harbour Energy, WK Andaman II, dalam rangka persiapan pemboran eksplorasi di WK Andaman II.

Dalam hal percepatan penyelesaian terkait isu-isu di bidang pertanahan, pengamanan dan perizinan KKKS, BPMA turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang diperlukan, antara lain:

1. Sosialisasi *template* Kertas Kerja Pemetaan (KKP) BMN Tanah dan Kertas Kerja Inventarisasi BMN tanah untuk KKKS.
2. Pemetaan lanjutan objek IP, pengumpulan dokumen perolehan dan dokumen administrasi dalam rangka IP tanah dengan DJKN.
3. Penyelesaian pengadaan tanah untuk ROW Slope Reinforcement dan pengukuran di Blok "A".
4. Klarifikasi atas hasil penelitian administratif dan pemeriksaan fisik BMN eks KKKS PHE NSB oleh PPBMN.
5. Penyerahan hasil pengadaan tanah skala besar untuk kebutuhan operasi migas Aceh dalam rangka operasi pemboran sumur pengembangan AS-13, AS-14 dan AS-15 di WK Blok "A" (PT Medco E&P Malaka).
6. Koordinasi lanjutan sertifikasi BMN berupa tanah, rekonsiliasi progress sertifikasi BMN berupa tanah dan pembahasan permasalahan sertifikasi BMN berupa tanah dengan KPKNL.

7. Asistensi pendampingan proses AMDAL dan RKL-RPL (antara tim Zaratex N.V. dengan PPLH-SDA USK).
8. Pembahasan dokumen persetujuan teknis Zaratex N.V dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Asistensi penerbitan Pertek pemenuhan BM air limbah yang dibuang ke laut KKKS Zaratex N.V oleh KLHK.
10. Rapat pembahasan pemeriksaan UKL-UPL pengeboran di WK Andaman II Harbour Energy.
11. Rekomendasi persetujuan pembelian bahan peledak untuk kebutuhan pemboran Sumur Rencong 1X milik KKKS Repsol Andaman B.V.
12. Pemrosesan Security Clearance (SC) untuk persiapan Seismic 3D di WK "B".
13. Evaluasi kontrak sekuriti WK "B" PGE dengan Divisi PARS BPMA.
14. Mereview rutin gangguan keamanan KKKS WK Aceh, termasuk evaluasi PKT POLRI dan PKS TNI AD terhadap tiga KKKS, PT Medco E&P Malaka, TPI dan PGE.
15. Mereview pengelolaan bahan peledak komersil KKKS WK Aceh secara berkala.
16. Monitoring dan evaluasi semester I dan II untuk PKT Pamsus Obvitnas Polda Aceh dengan KKKS.
17. Assesment persiapan dukungan pembinaan teritorial di wilayah operasi KKKS Aceh Timur dan Aceh Utara .
18. Bimtek Sistem Manajemen Pengamanan WK Aceh dengan melakukan supervisi dalam menyiapkan dokumen dan evaluasi SMP sebelum dilakukan Audit SMP (sesuai Perkaba 1 Tahun 2019).

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM)

Industri hulu minyak gas dan bumi (migas) yang juga merupakan usaha bidang ekstraktif memiliki tata aturan tersendiri berkaitan dengan pelaksanaan program tanggung jawab sosialnya. Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ("PPM") diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 9 ayat (3) yang intinya bahwa KKKS wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, di mana diantaranya adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Ayat ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang wajib dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia. Amanat ini juga tersurat didalam Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dimana setiap kegiatan usaha hulu migas diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat dan pembinaan daerah operasional usaha hulu migas.

Pada sisi yang lain, masyarakat melihat program yang digulirkan oleh perusahaan merupakan suatu pemberian yang bersifat wajib. Pelaku bisnis, perusahaan besar maupun kecil, memiliki

tanggung jawab untuk turut mengembangkan masyarakat di sekitarnya untuk menghindari terjadinya ketimpangan, kesenjangan serta kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan disharmonisasi sosial yang berujung pada terhambatnya kegiatan operasi produksi hulu migas.

Paradigma tanggung jawab sosial perusahaan tersebut perlu disikapi secara positif oleh seluruh perusahaan untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Keuntungan-keuntungan yang secara otomatis didapat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat di sini adalah adanya pengurangan resiko, meningkatnya good will, mengurangi biaya, membangun sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PT Pema Global Energi

PT Pema Global Energi ("PGE") turut berkontribusi pada lingkungan alam dan komunitas sosial sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dijalankan perusahaan akan menjadi skema yang tidak terpisahkan dari operasional perusahaan.

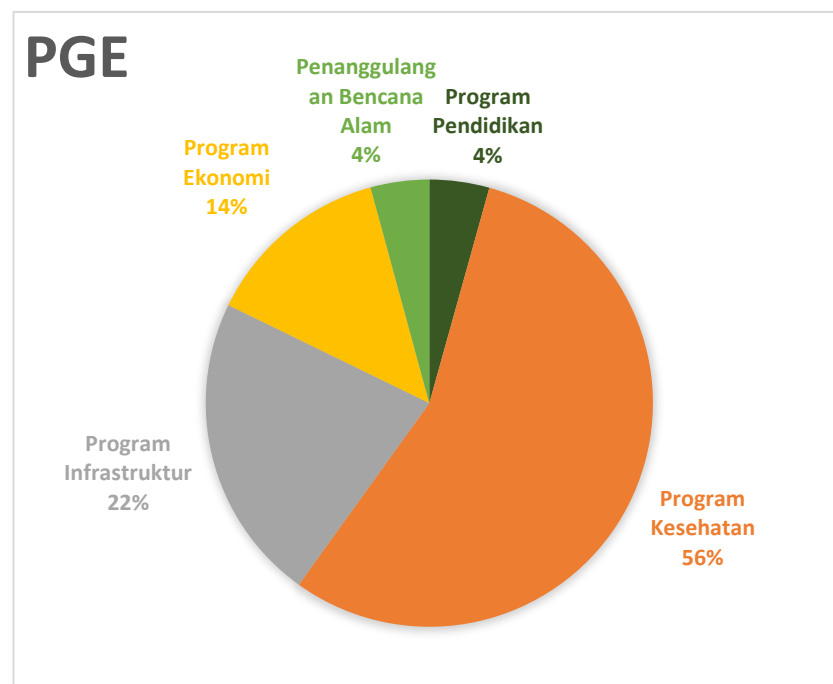
Dalam menjalankan program PPM, PGE berpanduan pada rencana strategis agar seluruh program bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan dan secara realistis memberi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan alam di sekitar perusahaan. Program Pengembangan Masyarakat yang diharapkan dapat menunjang masyarakat agar berkembang secara berkelanjutan dan mandiri namun juga tetap mengedepankan lingkungan masyarakat yang hijau.

Dampak Positif Program Program Kegiatan PPM diantaranya mengurangi isu-isu sosial dan lingkungan baik kemiskinan, tenaga kerja, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang guna operasional WK-B berjalan lancar dan aman; memberikan kemandirian ketrampilan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lingkaran tambang; dan meningkatkan produksi eksplorasi dan eksploitasi migas di WK "B" dan sumber-sumber migas baru sebagaimana Komitmen Kerja Pasti (KKP) PGE kepada Pemerintah Aceh.

Tabel 11 Ikhtisar Realisasi Anggaran PPM tahun 2023 PGE

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (IDR)	PENERIMA MANFAAT
1	Pelatihan vokasi (sertifikasi/non sertifikasi)	11.385.000	Pelatihan menjahit pemula untuk 12 ibu rumah tangga di desa Sumbok Rayeuk Kec. Nibong Kab. Aceh Utara
3	Beasiswa untuk Siswa SD, SMP, SMU dan Mahasiswa Berprestasi dan kurang mampu	295.000.000	120 anak Sekolah Dasar yatim dhuafa/dhuafa yang berasal dari 60 Desa pada 8 kecamatan di Kab. Aceh Utara
4	Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Masyarakat	321.744.000	Desa Ujong Baroh SB Kec. Tanah Luas
5	Santunan 4000 Yatim pada Ramadhan 1444 H / 2023 M	1.332.000.000	Kec. Matangkuli, Pirak Timu, Nibong, Sy. Aron, Tanah Luas, Langkahan, Paya Bakong, Baktiya, Baktiya Barat, Seunuddon, Jambo Aye, Lhoksukon dan Madat.
6	Santunan 42 Ekor Sapi meugang pada Ramadhan 1444 H / 2023 M	1.092.240.000	Kec. Matangkuli, Pirak Timu, Nibong, Sy. Aron, Tanah Luas, Langkahan & Paya Bakong
7	Operasi Katarak 100 Pasien dan pengobatan massal 300 orang (bakti sosial)	3.226.609.000	Kec. Matangkuli, Pirak Timu, Nibong, Sy. Aron, Tanah Luas, Langkahan, Paya Bakong, Meurah Mulia, Seunuddon, Tanah Pasir dan Baktiya.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (IDR)	PENERIMA MANFAAT
8	Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	152.500.000	Desa Rangkaya dan Rayeuk Munje, Kec. Tanah Luas
			Desa Nibong Wakeuh dan Nibong Baroh, Kec. Nibong
			Desa Meudang Ara, Kec. Baktiya
9	Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan	195.360.000	Desa Sumbok Rayeuk, Kec. Nibong
			Desa Tutong, Kec. Matangkuli
			Desa Ampeh, Kec. Tanah Luas
10	Program Ketahanan Pangan Keluarga	147.500.000	Provinsi Aceh
11	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat Setempat	97.615.000	Desa Sumbok Rayeuk dan Desa Keh Kec. Nibong, Desa Kanot Kec. Syamtalira Aron
12	Program Community Based Resources Development (CBRD)	154.875.000	Kec. Matangkuli, Pirak Timu, Nibong, Sy. Aron, Tanah Luas, Langkahan & Paya Bakong
13	Perbaikan sarana/prasarana masyarakat	988.812.500	Kec. Matangkuli, Pirak Timu, Nibong, Sy. Aron, Tanah Luas, Langkahan, Paya Bakong
14	Pembangunan Mushalla di desa terpencil	100.000.000	Warga dusun Sarah Raja Desa Leubok Pusaka Kec. Langkahan
15	Peralatan penunjang laboratorium SMKN 1 Migas	79.795.125	SMKN 1 Tanah Luas, Kec. Tanah Luas
16	Renovasi bangunan sekolah (Pembangunan MCK)	75.963.160	Dayah Bahrul Huda Mon Siribee
17	Pengadaan dan distribusi bantuan bencana alam	270.000.000	Kec. Matangkuli, Pirak Timu, Nibong, Sy. Aron, Tanah Luas, Langkahan & Paya Bakong
18	Penanganan Pasca Bencana		Kec. Matangkuli, Pirak Timu, Nibong, Sy. Aron, Tanah Luas, Langkahan & Paya Bakong
	Total	8.541.398.785	



Gambar 12 Komposisi Realisasi Anggaran PPM 2023 PGE

Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah direalisasikan oleh PGE di tahun 2023 sebanyak 11 Program yaitu:

- Kategori Pendidikan

Beasiswa untuk Siswa SD Kurang Mampu: Program ini bertujuan untuk memotivasi para pelajar tingkat sekolah dasar yang kurang mampu agar rajin belajar di sekolah, dan diharapkan pemerataan kesempatan belajar untuk para siswa yang kurang mampu dapat terwujud. Meskipun adanya program wajib sekolah 9 tahun dimana biaya sekolah dibebaskan dari pembiayaan (gratis) namun adakalanya para siswa dari keluarga kurang mampu merasa kurang percaya diri dikarenakan ketiadaan perlengkapan sekolah yang memadai. Dengan adanya program ini selain agar memicu para siswa dapat belajar lebih rajin lagi di sekolah juga diharapkan dapat meringankan beban para orangtua siswa yang kurang mampu.

120 siswa SD penerima manfaat berasal dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di Kec. Nibong, Syamtalira Aron, Tanah Luas, Matangkuli, Pirak Timu, Paya Bakong, Langkahan dan Baktiya Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh.



Gambar 13 Penyeraha beasiswa bagi keluarga kurang mampu

- Kategori Kesehatan

Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Masyarakat: Kegiatan berupa pembangunan 1 unit sumur bor sebagai upaya penyediaan air bersih layak minum berikut pemipaan dan juga sosialisasi serta edukasi kesehatan dan pola hidup sehat. Kegiatan dilakukan di desa Ujong Baroh SB Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.

Bakti Sosial Masyarakat: Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk operasi katarak untuk 100 lansia dan pengobatan massal untuk 350 lansia dhuafa dari 8 kecamatan ring 1 perusahaan di Kab. Aceh Utara.



Gambar 14 Bakti sosial operasi katarak Kabupaten Aceh Utara

Kategori Ekonomi

Program Peningkatan Hasil Produksi hasil Pertanian: Demplot Padi Semi Organik pada 50 Hektar Sawah di 5 (lima) Desa yaitu: Kec. Nibong – Desa Niboeng Baroh dan Niboeng Wakheuh, Kec. Tanah Luas – Desa Rangkaya dan Rayeuk Meunye dan Kec. Baktiya - Desa Meudang Ara. Kegiatan ini melibatkan sekitar 180 petani dan dilaksanakan pada penghujung tahun dimana telah memasuki musim penghujan dikarenakan waduk sebagai sumber air irigasi sawah warga masih belum dapat digunakan.

Pengembangan Pertanian dan Peternakan: Kegiatan ini melibatkan 3 kelompok tani/ternak masyarakat yaitu: 1 kelompok tani dengan Usaha Penggemukan Kambing di desa Ampeh Kec. Tanah Luas, 1 kelompok tani dengan usaha Penggemukan domba di desa Sumbok Rayeuk Kec. Nibong dan 1 kelompok tani dengan usaha Bebek Petelur di desa Tutong Kec. Matangkuli.

Program Ketahanan Pangan Keluarga. Program ini pada awalnya direncanakan dilaksanakan pada 6 desa disekitar perusahaan dengan penanaman tanaman produktif berupa jagung pipil pada lahan kosong. Namun realisasi kegiatan berupa kerjasama dengan Kodam Iskandar Muda dalam program I'M Jagong.

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat Setempat: Pada tahun 2023 PGE telah melaksanakan Pengembangan Usaha kepada 5 unit UMKM yang berlokasi disekitar wilayah kerja perusahaan yaitu: Produsen kue bolu khas Aceh yaitu Bolu Bhoi Mak Cek di desa Kanot Kec. Syamtalira Aron, Peternak Madu Kelulut Nibong Pase di desa Keh Kec. Nibong, Usaha Rumah Jahit di desa Sumbok Rayeuk Kec. Nibong, Produsen kue kering UKM Bungong Mane di desa

Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara dan Produsen Ikan Keumamah UKM KEUMAMAH di desa Pusong Lama Kec. Banda Kota Lhokseumawe.

Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat Setempat ini dilakukan dengan memberikan stimulant usaha berupa peralatan/perlengkapan penunjang produksi dan pemasaran, pendampingan manajemen usaha, pembenahan ruang produksi dan juga pendampingan pengurusan legalitas usaha.

Program Pendampingan Kegiatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi program ini berupa adanya pelibatan masyarakat setempat untuk mendampingi serta pemberian arahan teknis kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dan juga perusahaan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

- Kategori Infrastruktur

Dalam rangka berkontribusi pada perbaikan infrastruktur dasar ekonomi dan Pendidikan, PGE telah melakukan kegiatan di antaranya kegiatan pembersihan dan perbaikan sarana/prasarana penunjang kebersihan pada 6 desa lintasan jalan intercluster, Pembangunan 6 (enam) unit rumah Layak Huni untuk dhuafa, Pembangunan 1 unit sumur bor, Renovasi Ringan Meunasah Desa Mampree Kec. Syamtalira Aron (lokasi Drilling A-55), Renovasi Ringan Meunasah Desa Ampeh Kec. Syamtalira Aron (lokasi Drilling A-55), Renovasi Ringan Meunasah Desa Meudang Ara Kec. Baktiya (Drilling Rayeuk C-1), Bantuan sound system Meunasah Desa Ara Kec. Syamtalira Aron (lokasi Drilling A-55), Bantuan Sajadah Pesantren Asasul Huda Desa Parang Sikrueng Kec. Matangkuli, Bantuan Al Quran SMPN 1 Paya Bakong, Renovasi Ringan Mushalla Denpom Lhokseumawe, Renovasi Ringan Kantin Polres Lhokseumawe, Pembangunan 1 unit Mushalla di dusun terpencil di desa Sarah Raja Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, Pembangunan 1 unit MCK di Pesantren Bahrul Huda Mon Siribee Desa Parang Sikrueng Kec. Matangkuli, Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Migas SMKN 1 Tanah Luas.



Gambar 15 Rumah dhuafa sebelum dan setelah renovasi

- Kategori Bencana

Pada tahun 2023 Perusahaan tidak hanya menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban maupun masyarakat terdampak bencana alam dan non alam di Kabupaten Aceh Utara. Namun

juga telah melakukan kegiatan Penanggulangan bencana alam banjir berupa penyaluran 1 unit perahu karet lengkap dengan mesin penggerak yang disalurkan melalui PMI Aceh Utara untuk desa-desa yang kerap dilanda banjir tahunan. Selain itu, kegiatan mitigasi banjir juga dilaksanakan dengan pembersihan tali air dan sungai disekitar wilayah kerja perusahaan. Bantuan bencana tahun 2023 juga dialokasikan berupa donasi kemanusiaan atas bencana perang di Palestina.

PT Medco E&P Malaka

Sebagai Perusahaan yang sangat peduli terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja, maka PT Medco E & P Malaka menerapkan beberapa Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga perkembangan perekonomian di sekitar wilayah kerja Perusahaan terus berputar. Dalam menerapkan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PT Medco E & P Malaka melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan agar sasaran program tercapai sesuai target yang ditentukan berdampak pada kelancaran operasi Perusahaan.



Gambar 16 Pendampingan budidaya ikan air tawar di Aceh timur

Dalam merealisasikan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PT Medco E & P Malaka mengutamakan masyarakat di sekitar wilayah kerja yang terdiri dari Ring-1 Perusahaan terdiri dari : 16 Desa pada 4 Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Jalur Trucking Kondensat terdiri dari Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa, Kantor Representative PT Medco E & P Malaka di Banda Aceh.

Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) akan memberikan dampak terhadap kelancaran operasi Perusahaan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Berikut beberapa dampak terhadap pelaksanaan PPM PT Medco E & P Malaka di sekitar wilayah kerja dimana dapat menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan di sekitar wilayah kerja,

meningkatkan citra positif Perusahaan, mendapatkan dukungan sosial dalam kegiatan operasi untuk keberlanjutan Perusahaan, meningkatkan pengetahuan Masyarakat sebagai penerima



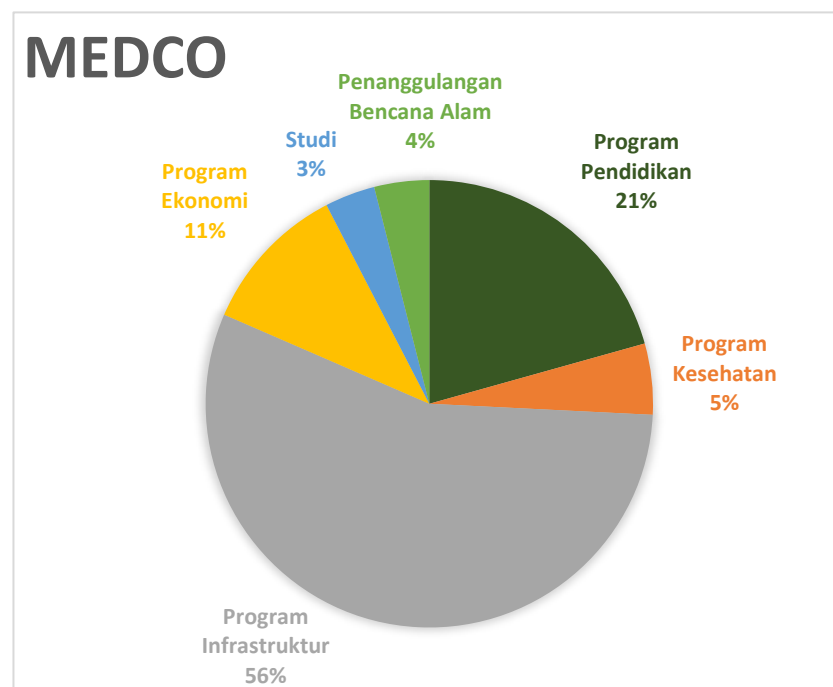
Gambar 17 Penyerahan bantuan beasiswa pendidikan PT Medco E&P Malaka di Aceh Timur

manfaat Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian Masyarakat sehingga tidak bergantung pada industri yang ada, berdamai dengan Pemerintah dalam mewujudkan Masyarakat yang lebih sejahtera dalam kehidupan sehingga dapat lebih mandiri.

Tabel 12 Ikhtisar Realisasi Anggaran PPM tahun 2023 PT Medco E&P Malaka

KATEGORI	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI (USD)
Pendidikan	Peningkatan Kapasitas SDM		
	1	Dukungan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat	2,499
	2	Peningkatan Kapasitas pendidikan masyarakat melalui Program Rumah Pemberdayaan	46,856
	3	Bantuan Pendidikan	12,315
Kesehatan	Pengembangan Budaya Hidup Sehat		
	1	Penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar lokasi pengembangan Gas	-
	2	Pelayanan kesehatan dan pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil, bayi, balita dan manula yang berada disekitar lokasi Perusahaan	15,317
Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Lokal		
	1	Program Pertanian dan Perkebunan (Padi, Singkong, Hortikultura)	17,534
	2	Program Peternakan dan Perikanan	5,423
	3	Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan serta bantuan dukungan sarana prasarana pengembangan ekonomi Pemuda berbasis Kemitraan	6,089
	4	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal	3,429

KATEGORI	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI (USD)
Infrastruktur	1	Perbaikan infrastruktur fasilitas umum masyarakat sekitar lokasi Proyek	43,129
	2	Perbaikan jalan akses masyarakat dan perbaikan jalan kecamatan	123,252
Lingkungan	Program Pemulihan lingkungan, revegetasi, sanitasi dan penyediaan sarana air bersih di sekitar lokasi sumur, CPP, dan RoW		-
Bencana Alam	Bantuan Bencana Alam		
	1	Bencana Lokal	11,845
	2	Bencana Nasional	-
Studi	Studi		
	1	Studi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	6,780
	2	Studi Mini Sosial Mapping	4,068
Total Program Pengembangan Masyarakat (<i>Cost Recovery</i>)			298,534
Infrastruktur	Pembangunan Rumah Layak Huni		37,285
Total Program Pengembangan Masyarakat (<i>Non Cost Recovery</i>)			37,285



Gambar 18 Komposisi Realisasi Anggaran PPM 2023 PT Medco E&P Malaka

Triangle Pase Inc.

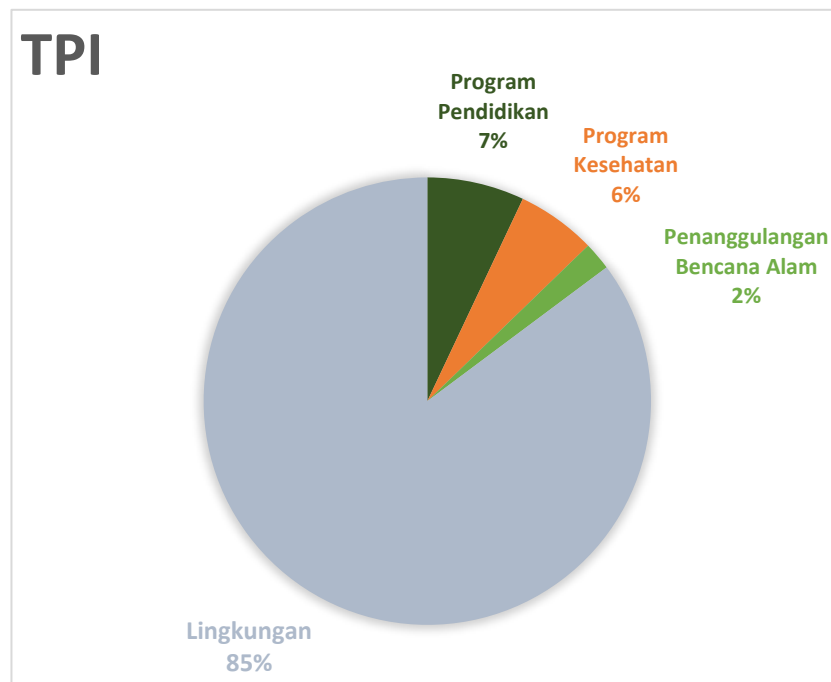
Triangle Pase Inc. ("TPI") merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang terletak di Aceh dan saat ini meliputi wilayah kerja seluas 890 km². TPI telah berpartisipasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengangkat potensi sumber daya alam dan manusia dari Aceh Timur agar diketahui investor. Walaupun masih tergolong baru dalam industri migas di provinsi Aceh, TPI telah banyak berbuat untuk masyarakat. Bentuk tanggungjawab sosial tersebut dapat berupa perhatian dan dukungan dalam mengembangkan kapasitas para stakeholder perusahaan salah satunya adalah masyarakat yang berada disekitar wilayah kerja perusahaan. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang utama. Berbagai intervensi

untuk mengembangkan kapasitas mereka seperti kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan. Namun demikian, intervensi tersebut haruslah tepat guna, sasaran dan juga waktu, sehingga efektifitas dukungan akan lebih tinggi. Wilayah kerja Operasi TPI berada di dalam Desa Sijudo dan Desa Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur. Kedua Desa ini merupakan Desa yang terpencil terletak di kaki bukit barisan yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Jarak lokasi kerja TPI dengan Ibu Kota Kecamatan Pante Bidari lebih kurang 42 km dengan jarak tempuh ke lokasi kerja lebih kurang 3 jam. Tantangan demi tantangan telah dilalui, diantaranya memperbaiki jalan dan jembatan agar dapat mempermudah akses menuju lokasi. Hal ini dilakukan agar mempermudah akses menuju ke lokasi. Untuk saat ini, Desa yang menjadi perhatian khusus oleh TPI semakin bertambah. Desa tersebut adalah Desa Seunebok Bayu dan Desa Alue ie Mirah Kecamatan Indra Makmur. Hal ini dikarenakan TPI menggunakan jalur keluar masuk menuju lokasi Lapangan Pase melalui jalan desa tersebut. Pada mulanya sebelum TPI beroperasi di wilayah tersebut, masyarakat sekitar menggunakan jalur transportasi sungai atau harus menempuh jalan kecil dengan jarak tempuh yang jauh untuk mengangkut hasil bumi yang akan dipasarkan ke Kecamatan. Pada tahun 2010 sampai sekarang TPI berusaha selalu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari bidang infrastruktur, yaitu dengan memperbaiki jalan tersebut, yang memang digunakan untuk keperluan operasional serta digunakan juga oleh masyarakat banyak. Kondisi sekarang masyarakat tidak lagi menggunakan transportasi sungai dan jarak tempuh mejadi lebih dekat, sehingga mempercepat akses pengangkutan hasil bumi ke Kecamatan.

Tabel 13 Ikhtisar Realisasi Anggaran PPM tahun 2023 TPI

NO	KATEGORI	RENCANA PROGRAM	REALISASI 2023 (DALAM USD)
1	Pendidikan	Lanjutan Bantuan pendukung Pendidikan kepada putra/putri daerah yang membutuhkan dan berprestasi: Beasiswa pendidikan putra/putri lingkaran tambang TPI yang berprestasi dengan detail sebagai berikut: a. Beasiswa tingkat SLTA sebanyak 2 orang dengan nilai Rp 750.000 perbulan perorang b. Beasiswa tingkat perkuliahan sebanyak 2 orang dengan nilai Rp 850.000 perbulan perorang dan uang semester senilai Rp 1.500.000 persemester perorang	1.136
2	Kesehatan	Bantuan kepada 3 orang bidan desa Sijudo senilai Rp. 500.000 per orang/ bulan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ketika ada kegiatan umum masyarakat dan pemberian healthy kit dan pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan atau balita	929

NO	KATEGORI	RENCANA PROGRAM	REALISASI 2023 (DALAM USD)
4	Lingkungan	Bersih jembatan, Radio Tower dan jalur pipa gas: Pemberdayaan Tenaga Masyarakat guna memelihara dan membersihkan jembatan, lingkungan radio tower dan sepanjang TPI ROW berbasis Community Approach sehingga keselamatan lingkungan dan aspek peningkatan ekonomi warga desa bisa berjalan seimbang. Masyarakat desa yang terlibat dalam program ini adalah dari desa Sijudo dan Blang Seunong.	13.784
6	Bencana Alam	Bantuan Bencana Alam Nasional	329
TOTAL			16.178



Gambar 19 Diagram Komposisi Realisasi Anggaran PPM 2023 TPI

Adapun dampak pelaksanaan program terhadap kelancaran operasi diantaranya terbentuknya citra positif bagi TPI dan terbinanya hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Selama tahun 2023, TPI tidak pernah ada masalah dengan masyarakat baik demonstrasi ataupun protes dari warga setempat. Dan tidak ada gangguan apapun terhadap fasilitas, kendaraan operasional ataupun karyawan TPI, sehingga karyawan merasa aman dan nyaman serta menciptakan produktivitas kerja yang baik.

C. OPTIMASI LIFTING COST PRODUKSI MINYAK & GAS BUMI

Lifting cost atau biaya operasi produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu satuan volume minyak dan gas bumi merupakan biaya yang timbul untuk mengoperasikan dan mempertahankan produksi suatu sumur migas, termasuk juga melakukan *maintenance* terhadap fasilitas produksi dan kebutuhan lainnya. *Lifting cost* dianggap sebagai salah satu parameter ekonomis yang dapat dijadikan sebagai indikator penting terhadap potensi keuntungan dari

produksi suatu lapangan migas. Semakin kecil nilai *lifting cost* suatu proyek maka dianggap semakin baik dan ekonomis proyek tersebut.

BPMA memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap biaya operasi KKKS, yaitu melakukan evaluasi biaya sehingga mencapai tingkat yang paling efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan hasil dan kontribusi yang optimal pada pencapaian produksi, *lifting* dan penerimaan negara.

Tercatat realisasi *lifting cost* produksi minyak dan gas tahun 2023 di wilayah kewenangan Aceh sebesar 15,98 US\$/boe, atau lebih rendah dari target ambang batas *lifting cost* produksi tahun 2023 yaitu US\$ 17 US\$/boe, dengan capaian 106%, namun lebih tinggi dari target Renstra 2023 di angka 12 US\$/boe. Perubahan target Renstra 2023 di angka 12 US\$/boe menjadi target PK BPMA 2023 di angka 17 US\$/boe disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah perubahan strategi pengembangan lapangan Blok "A" yang mempertimbangkan laju penurunan produksi lebih tinggi dari perkiraan awal, terkendalanya onstream produksi dari WK Pase Lapangan Pase B karena hasil pemboran Sumur Pengembangan BP-1A tidak mencapai target reservoir, dan karena pending onstream produksi dari komitmen pengembangan lapangan Peusangan B WK Lhokseumawe. Selain itu perubahan target pada PK Tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra juga diakibatkan perubahan strategi pengembangan Lapangan di WK "B", dimana ketika penyusunan Renstra di tahun 2020 PHE NSB masih menjadi operator di WK "B". Sebagaimana kita ketahui bersama, di Mei 2021 terjadi proses alih kelola WK "B" dari PHE NSB kepada PGE. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan besar-besaran dari aspek pengembangan lapangan WK "B". Salah satu yang cukup berimplikasi adalah Project Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) Arun-SLS dalam rangka melakukan efisiensi penggunaan fuel gas pada fasilitas produksi di WK "B". Project OPL tersebut menggunakan skema rental fasilitas produksi yang berdampak pada bertambahnya *operating cost*. Meskipun demikian project tersebut dapat memperpanjang *lifetime* operasi produksi di Lapangan Arun-SLS yang semula diperkirakan akan selesai di tahun 2025 menjadi 2031.

Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi *lifting cost* minyak dan gas bumi di tahun 2022 di angka 12,33 US\$/boe, *lifting cost* tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 30%. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, peningkatan *lifting cost* tersebut tidak lepas dari biaya operasi yang meningkat, bahwa di 2023 adalah tahun mulai diterapkan komitmen pada Project Optimasi Pengembangan Lapangan Arun-SLS yang dilakukan secara bertahap.

BPMA terus mendorong terhadap upaya penurunan *lifting cost* minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh agar dapat dilakukan secara optimal. Langkah yang diambil antara lain adalah dengan peningkatan produksi dan *lifting* serta pengendalian biaya operasi produksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *lifting* diantaranya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu melakukan optimalisasi fasilitas produksi sehingga mengefisiensikan volume

gas yang terbuang untuk *own use* dan meningkatkan kehandalan fasilitas produksi. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah melakukan koordinasi jadwal *lifting* dan pengawasan kegiatan *lifting* di akhir bulan.

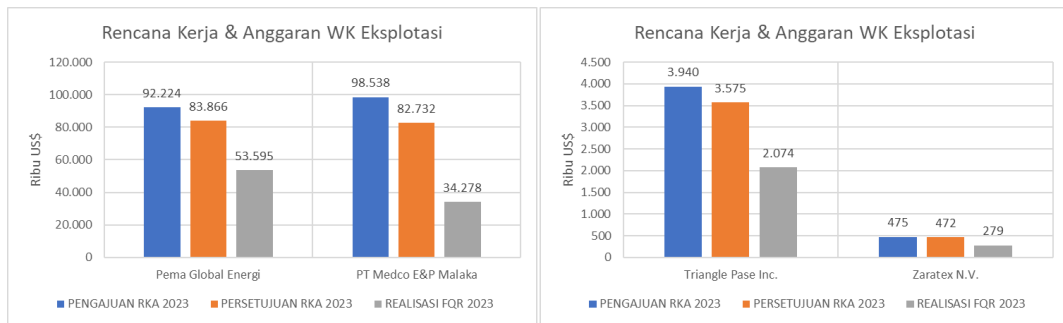
PERENCANAAN & REALISASI BIAYA OPERASI PRODUKSI KEGIATAN HULU MIGAS WILAYAH ACEH

Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan biaya operasi, BPMA menjalankan tiga tahapan proses, yaitu pengendalian dan pengawasan saat awal akan terjadinya biaya (*preaudit*); saat eksekusi biaya dan pelaksanaan pekerjaan (*current audit*); dan terakhir adalah setelah biaya terjadi dan pekerjaan selesai dilakukan (*postaudit*).

Preaudit dilakukan melalui pengawasan terhadap perencanaan yang diusulkan KKKS. Pengawasan perencanaan antara lain dilakukan melalui persetujuan rencana pengembangan lapangan atau *Plan of Development (POD)* yang mencerminkan rencana jangka panjang KKKS termasuk prediksi biaya operasi produksi yang dibutuhkan sepanjang masa kontrak kerja sama. Rencana jangka Panjang di dalam *POD* tersebut kemudian pada setiap tahun nya akan dievaluasi dan dilakukan pengawasan melalui mekanisme *monitoring POD*. Jika setelah dievaluasi, baik aspek teknis maupun keekonomiannya, kemudian dirasa perlu untuk melakukan perubahan, maka pada saat *monitoring POD* tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk perubahan dan langkah yang akan diambil selanjutnya. Saat ini terdapat 4 (empat) KKKS dibawah kewenangan BPMA yang telah memiliki persetujuan *POD*, antara lain:

1. *POD* selanjutnya ARAS WK Blok "A" yang disetujui pada 28 Desember 2007.
2. *POD* 1 Peusangan WK Lhokseumawe yang disetujui pada 9 Oktober 2019.
3. *POD* selanjutnya Pase A dan Pase B WK Pase yang disetujui pada 17 November 1995.
4. Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) Arun dan SLS WK "B" yang disetujui pada 10 November 2022.

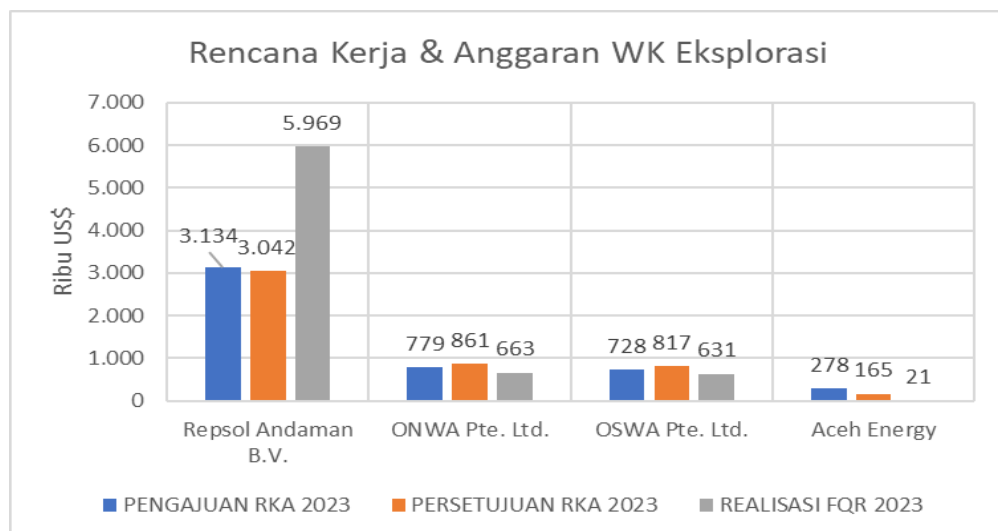
Pada tahap *pre_audit*, pengawasan juga dilakukan ketika penyusunan program kerja dan anggaran tahunan, yaitu melalui persetujuan Work, Program and Budgeting (WP&B) atau Rencana Kerja dan Anggaran ("RKA"). Persetujuan RKA setiap KKKS diterbitkan setelah melalui tahapan pembahasan teknis dan biaya dilakukan secara regular pada triwulan ke-empat. Realisasi terhadap RKA tersebut dilaporkan kepada BPMA melalui *Finance Montly Report ("FMR")* dan *Finance Quarter Report ("FQR")*. Berikut ini adalah realisasi RKA tahun 2023 untuk KKKS eksploitasi disajikan dalam diagram di bawah ini:



Gambar 20 Perbandingan anggaran persetujuan pada RKA dan realisasi pada FQR tahun 2023 KKKS eksploitasi

Untuk rencana kerja dan kegiatan KKKS eksploitasi tahun 2023, BPMA menyetujui anggaran sebesar US\$170,65 Juta, atau 87% dari pengajuan KKKS yang mencapai US\$195,18 Juta. Besar anggaran realisasi RKA KKKS eksploitasi sebesar US\$90,23 Juta atau 53% dari persetujuan RKA tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi penyebab perbedaan anggaran antara RKA dengan Realisasi FQR, antara lain:

1. Di WK "B" terdapat *under budget* pada kegiatan pemboran sumur eksplorasi dimana semula direncanakan dapat diselesaikan 3 (tiga) sumur eksplorasi, namun realisasinya hanya dapat diselesaikan satu sumur, yaitu Arun A-55A, sedangkan sisa 2 (dua) sumur lainnya akan dialihkan pekerjaannya di tahun 2024. Disamping itu juga terdapat *under budget* akibat mundurnya realisasi beberapa kegiatan, antara lain sewa *booster compressor*, sewa *power generation*, pengadaan ICT dan kegiatan rekrutmen *man power*. *Over Budget* hanya terjadi pada aktual pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih tinggi.
2. Di WK Blok "A" terdapat *under budget* dikarenakan pengalihan pekerjaan ke tahun 2024 terhadap (dua) 2 sumur pengembangan dan pekerjaan *workover Acid Fracturing AS-12*, penurunan biaya *lifting* sulfur karena perubahan titik serah, penurunan biaya *O&M operatorship* PGE, dibatalkannya kegiatan pindah lapisan pada sumur JR-71 terkait aspek *success ratio* yang kecil dikarenakan permasalahan *well integrity*.



Gambar 21 Perbandingan anggaran persetujuan pada RKA dan realisasi pada FQR tahun 2023 KKKS eksplorasi

Untuk rencana kerja dan kegiatan KKKS eksplorasi tahun 2023, BPMA menyetujui anggaran sebesar US\$4,89 Juta, atau 99,31% dari pengajuan KKKS yang mencapai US\$4,92 Juta. Besar anggaran realisasi RKA KKKS eksplorasi sebesar US\$7,28 Juta atau 149% dari persetujuan anggaran tahun 2023.

Selain pengawasan RKA, BPMA juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang bersifat proyek. Pengawasan proyek dilakukan saat pertama kali KKKS menyampaikan rencana proyek yang dituangkan dalam *Authorization for Expenditure* (AFE) yang juga mensyaratkan persetujuan BPMA. Tercatat selama tahun 2023 sejumlah AFE telah disetujui oleh BPMA, antara lain:

Tabel 14 Perbandingan antara nilai usulan vs kesepakatan AFE tahun 2023

No	KKKS	AFE 2023			
		Jumlah AFE	DESKRIPSI KEGIATAN	USULAN KKKS (Ribu US\$)	DISEPAKATI (Ribu US\$)
1	PT PEMA GLOBAL ENERGI	2	Akuisisi & Processing Seismik Darat AOB Extension 240 KM2	22.792	21.815
2	PT MEDCO E&P MALAKA	2	Acid Fracturing Sumur AS 12 & Change Layer JR-71	4.565	4.128
3	ONWA Pte. Ltd.	1	Enviromental Baseline Assesment (EBA) untuk WK ONWA	149	149
4	OSWA Pte. Ltd.	1	Enviromental Baseline Assesment (EBA) untuk WK OSWA	149	149
TOTAL				27.654	26.240

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET HULU MIGAS DAN PROSES PENGADAAN

Pengelolaan rantai suplai yang baik merupakan salah satu penentu kelancaran suatu proyek di lapangan. Hambatan-hambatan yang berimplikasi kepada pengadaan barang dan jasa tentu juga akan berdampak nyata terhadap penyelesaian proyek-proyek hulu migas. Namun sebaliknya, pengelolaan rantai suplai yang baik akan berimplikasi positif kepada dukungan peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

Salah satu tugas dan wewenang BPMA adalah pengendalian biaya operasi produksi yang merupakan bagian dari tahapan *current audit*, yaitu pengawasan atas mekanisme pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pengawasan terhadap pengadaan dilakukan dengan menerapkan pedoman tata kerja yang menjadi acuan bagi KKKS dalam pengadaan barang dan jasa. Demi mencapai tujuan pengendalian biaya operasi produksi yang optimal salah satu usaha yang dilakukan adalah pengendalian dan pengawasan pada proses pengadaan dimana BPMA mempunyai peranan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri ("HPS") atau *Owner Estimate* oleh KKKS.

Selain melalui proses pengadaan, upaya lain yang dilakukan untuk menjaga *lifting cost* dan efisiensi *cost recovery* minyak dan gas bumi di wilayah Aceh agar dapat optimal adalah melakukan penghematan dari optimalisasi aset bersama, tentunya dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan operasi hulu migas dan percepatan pelaksanaan proyek. BPMA berperan besar

dalam mengawasi dan merekomendasikan penggunaan aset bersama baik itu melalui mekanisme transfer aset antar KKKS, pinjam pakai maupun *Facility Sharing Agreement* ("FSA").

Berikut adalah beberapa informasi FSA pada kegiatan hulu migas di wilayah Aceh:

Tabel 15 FSA pada kegiatan hulu migas wilayah Aceh

NO.	FACILITY SHARING AGREEMENT	KKKS YANG TERLIBAT
1	Perjanjian Pemanfaatan Fasilitas secara Bersama	PHE NSO dan PGE
2	Perjanjian tentang Penyediaan Jasa Operating & Maintenance untuk Fasilitas Pemrosesan Gas Treating Unit dan Condensate Recovery Unit	PHE NSO-PGE dan PAG
3	Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Fasilitas Booster Compresor-Unit 26	PGE dan PHE NSO
4	Perjanjian Operasi atas Fasilitas Bersama (Eks Kilang Arun)	PGE dan TPI
5	Perjanjian Operasi Fasilitas Kondensat di Kilang Arun	PHE NSO, PGE dan PT Medco E&P Malaka

Berikut adalah pelaksanaan pemanfaatan dan optimalisasi aset dan material persediaan yang dilakukan pada tahun 2023 adalah:

1. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara PT Medco E&P Lematang kepada PT Medco E&P Malaka senilai 1.451,13 USD berupa Humidifier untuk Maintenance, Repair dan Operasi;
2. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara PT Medco E&P Malaka kepada PT Medco E&P Rimau senilai 1.945,10 USD berupa Flange;
3. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara TPI kepada Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd senilai 121.366,28 USD berupa Tubing dan Cross Over;
4. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara PT Medco E&P Indonesia kepada PT Medco E&P Malaka senilai 683,21 USD berupa Valve untuk Maintenance, Repair dan Operasi;
5. Proses pengembalian BMN eks KKKS Repsol Andaman B.V. kepada Pemerintah akan dilakukan pada akhir Februari 2024 dikarenakan terdapat sejumlah kesalahan data dari hasil pemeriksaan administrasi, selanjutnya akan dilakukan Pemeriksaan Fisik BMN bersama antara PPBMN KESDM, BPMA dan eks KKKS Repsol Andaman B.V.;
6. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara PT Medco E&P Malaka kepada Medco E&P Grissik Ltd. senilai 2.546,04 USD berupa Board CCA Control untuk Maintenance, Repair dan Operasi;
7. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara Medco E&P Grissik Ltd. kepada PT Medco E&P Malaka senilai 521,20 USD berupa Gasket untuk Maintenance dan Repair;
8. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara PT Medco E&P Malaka kepada PT Medco E&P Rimau senilai 225 USD berupa Flange;
9. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara PT Medco E&P Malaka kepada Medco E&P Natuna Ltd senilai 199.012,00 USD berupa Casing dan Tubing;
10. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara Medco E&P Grissik Ltd. kepada PT Medco E&P Malaka senilai 1.362,20 USD berupa Source Lamp untuk Maintenance dan Repair;

11. Rekomendasi dan realisasi transfer aset antara PT Medco E&P Rimau kepada PT Medco E&P Malaka senilai 158,24 USD berupa Bearing untuk Maintenance dan Repair;
12. Rekomendasi dan Realisasi transfer aset antara PT Medco E&P Indonesia kepada PT Medco E&P Malaka senilai 63,17 USD berupa Gasket untuk Maintenance dan Repair;
13. Rekomendasi transfer aset antara PT Medco E&P Lematang kepada PT Medco E&P Malaka senilai 64,00 USD berupa Gasket untuk Maintenance dan Repair;
14. Rekomendasi transfer aset antara PT Medco E&P Malaka kepada PT Medco E&P Lematang senilai 4.119,65 USD berupa Chemical Norit untuk Maintenance;
15. Rekomendasi transfer aset antara PT Medco E&P Malaka kepada PT Medco E&P Rimau senilai 2.457,60 USD berupa Switch Vibratiom untuk Maintenance dan Repair;
16. Rekomendasi transfer aset antara Zaratex N.V. kepada PT EMP Tonga senilai 78.755,00 USD berupa Casing Tubing untuk Drilling;
17. Rekomendasi transfer aset antara Zaratex N.V. kepada PT Imbang Tatan Alam senilai 217.463,95 USD berupa Casing dan Pup Joint untuk Drilling;
18. Rekomendasi transfer aset antara Zaratex N.V. kepada PT EMP Tonga senilai 0,00 USD berupa Tubing ex used untuk Drilling;
19. Rekomendasi transfer aset antara Zaratex N.V. kepada PT EMP Tonga senilai 0,00 USD berupa Rock Bit ex used untuk Drilling.

Data laporan Aset KKKS eksploitasi dan eksplorasi di wilayah kewenangan Aceh tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 16 Laporan Aset Harta Benda Modal (HBM) KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi Tahun 2023

NAMA KKKS	NILAI WAJAR/NILAI PEROLEHAN AKHIR	NILAI BUKU	NILAI WAJAR/NILAI PEROLEHAN AKHIR	NILAI BUKU
	AUDITED 2022 (MILIAR RUPIAH)		SEMESTER I 2023 (MILIAR RUPIAH)	
PT Medco E&P Malaka	7.075,71	6.311,82	7.064,89	6.223,67
Triangle Pase Inc.	474,98	57,32	474,15	32,95
Zaratex N.V.	42,03	42,03	40,15	40,15
PT Pema Global Energi	-	-	-	-
ONWA Pte. Ltd.	-	-	-	-
OSWA Pte. Ltd.	-	-	-	-
PT Aceh Energy	-	-	-	-
Eks. Repsol Andaman B.V.	86,20	84,68	82,40	80,89
Eks. KRX Energy (SBA) Pte. Ltd.	0,17	-	0,17	-
Eks. Pertamina Hulu Energi NSB	6.276,09	1.075,18	6.580,45	1.336,37
Eks. Seruway Offshore	-	-	-	-

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN POST AUDIT

Post Audit dilaksanakan dengan menggunakan prosedur audit yang secara umum digunakan dalam audit *PSC Cost Recovery*. Kontraktor KKS secara internal melakukan audit atas laporan keuangan mereka. Sampai dengan tahun 2023, audit terhadap Kontraktor KKS di wilayah Aceh

yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah, dilakukan secara bersama-sama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak, dan BPMA, berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. S-432/MK.02/2020 hal Permintaan Pemeriksaan atas Perpajakan, Bagian Negara, dan Kepatutan Biaya Operasi KKKS Hulu Migas di Wilayah Kewenangan BPMA, yang meminta BPKP dengan mengikutsertakan BPMA dan DJP untuk melakukan pemeriksaan atas perpajakan, bagian negara, dan kepatutan biaya operasi KKKS hulu migas di wilayah kewenangan BPMA. Pada tanggal 18 September 2023, telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2015 ("PP23/2015"). Sehingga kedepannya, sesuai dengan PMK 94 Tahun 2023 ini, pemeriksaan terhadap KKKS di WK Aceh, akan dilaksanakan dalam bingkai Satgas Pemeriksaan Bersama II, yang beranggotakan BPKP, Inspektorat Aceh, BPMA dan DJP. Untuk persiapan pelaksanaan Pemeriksaan KKKS melalui bingkai Satgas Pemeriksaan Bersama II tersebut, ditahun 2023 ini telah dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk pembahasan awal terkait dengan struktur keanggotaan, Petunjuk Teknis Pemeriksaan, Kesekretariatan dan anggaran Satgas Pemeriksaan Bersama II tersebut. Ditahun 2022, juga telah dilakukan pembekalan terhadap calon Auditor Satgas PB II dari 4 instansi anggota Satgas PB II dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek), dengan pengajar dari BPKP, SKK Migas, DJP dan BPMA sendiri.

Diluar kegiatan audit KKKS, ditahun ini Divisi Audit BPMA telah melakukan fungsi Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit KKKS PHE NSB untuk WK "B", untuk tahun buku 2015-2017, yang pelaksanaan auditnya dilakukan ditahun 2020, serta Monitoring Tindak Lanjut hasil Audit untuk tahun buku 2018-2020, yang pelaksanaan auditnya telah dilakukan pada tahun 2021. Kedua kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit ini telah dilaksanakan dengan baik dan disepakati dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Monitoring Tindak Lanjut.

Kemudian, juga telah dilakukan penyelesaian pemeriksaan *Closed Out Report ("COR")* KKKS di wilayah kewenangan Aceh, dengan total nilai pemeriksaan sebesar US\$157,82 Juta, antara lain COR Pemboran Sumur Eksplorasi Rencong 1X WK Andaman III, COR Pemboran Sumur Eksplorasi Matang WK Blok "A", COR Multiphase Flow Meter (MPFM) WK Blok "A".

D. KOMITMEN TKDN PADA INDUSTRI HULU MIGAS

Kegiatan sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah maupun nasional dengan efek berganda (*multiplier effect*) di berbagai bidang seperti ekonomi, lapangan kerja, peningkatan kapasitas nasional dengan meningkatnya investasi produsen atau penyedia barang/jasa dalam negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN").

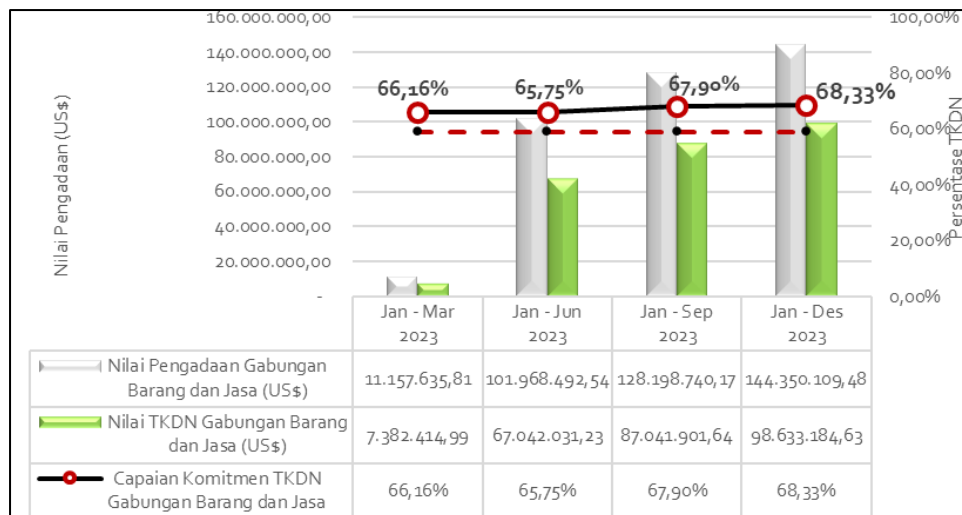
Target Komitmen TKDN pada kegiatan usaha hulu migas ditetapkan berdasarkan road map target TKDN pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan berdasarkan data RKA atau Work Program & Budget ("WP&B") serta daftar pengadaan (*procurement list*) dari seluruh KKKS di wilayah kewenangan Aceh.

Di tahun 2023, realisasi TKDN dari industri penunjang hulu migas di wilayah Aceh mencapai 68,33%, lebih tinggi dari target minimum TKDN tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 61%. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan target Renstra BPMA tahun 2023 pada angka 55%.

Upaya-upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai target TKDN tersebut adalah:

1. Pelaksanaan pengawasan pada perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa KKKS dalam menentukan batasan minimal TKDN Tender;
2. Penyampaian surat edaran target minimum TKDN hulu migas kepada seluruh KKKS;
3. Evaluasi dan pengawasan pengadaan barang/jasa KKKS dari tahapan perencanaan hingga *Contract-in-place*;
4. Evaluasi dan pengawasan aspek Manajemen Kontrak KKKS namun tidak terbatas pada Perubahan Lingkup Kontrak/Kerja (PLK) terhadap Komitmen TKDN;
5. Pengawasan dan evaluasi pengajuan barang impor oleh KKKS;
6. Pengawasan dan evaluasi laporan bulanan pengadaan barang/jasa terhadap capaian komitmen TKDN KKKS;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progress terhadap realisasi pencapaian TKDN KKKS;
8. Pelaksanaan penilaian KPI SCM lingkup aset dan rantai suplai KKKS serta pelaksanaan audit kepatuhan lingkup kapasitas nasional/TKDN KKKS; dan
9. Pelaksanaan rutin kegiatan Vendor Day.

Tercatat hingga akhir tahun 2023 total nilai pengadaan gabungan barang dan jasa KKKS di wilayah kewenangan Aceh mencapai sebesar US\$ 144,35 juta dengan nilai TKDN gabungan barang dan jasa industri penunjang hulu migas wilayah Aceh mencapai US\$98,63 juta atau setara dengan Rp1,45 triliun yang berarti semakin meningkatnya penggunaan barang/jasa dalam negeri dari tahun sebelumnya yaitu capaian TKDN di tahun 2022 yang bernilai US\$ 87 Juta. Jika dibandingkan di level Nasional, Realisasi TKDN industri penunjang hulu migas adalah sebesar 58,1% atau setara dengan US\$5,08 Miliar dari total pengadaan sebesar US\$9,68 Miliar.



Gambar 22 Capaian komitmen TKDN hulu migas di wilayah kewenangan Aceh tahun 2023

BPMA terus mendorong KKKS di wilayah kewenangan Aceh untuk wajib menggunakan barang dan jasa dalam negeri mengacu kepada Daftar Apresiasi Produk Dalam Negeri ("APDN") migas dan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri ("DIBJPDN") dari Kementerian Perindustrian, mengutamakan keterlibatan perusahaan dalam negeri serta meningkatkan peran industri nasional dan keberpihakan dalam menggerakkan ekonomi daerah yang diwujudkan melalui Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa BPMA dimana dinyatakan bahwa pemanfaatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai Rp 25 miliar dilaksanakan oleh pengusaha/penyedia barang dan jasa di daerah operasi KKKS dalam pelaksanaan proyek hulu migas.

SASARAN PROGRAM 2: OPTIMALISASI KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS WILAYAH KEWENANGAN ACEH YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 2 adalah:

E. PENERIMAAN NEGARA DARI SUB SEKTOR MIGAS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH

Penerimaan negara dari minyak dan gas bumi pada tahun 2023 di wilayah Aceh sebelum pengembalian Harga Gas Bumi Tertentu ("HGBT") adalah sebesar US\$14,96 Juta dengan rincian US\$13,86 juta bagi hasil migas dan US\$1,1 Juta dari PNBP Signature Bonus 3 (tiga) WK baru ONWA, OSHA dan Bireun Sigli, atau 103,03% dari target PK BPMA tahun 2023 sebesar US\$14,52 juta, meskipun jika dibandingkan dengan angka US\$49,22 Juta yang merupakan target pada Renstra BPMA tahun 2023, maka capaian tahun 2023 terbilang cukup kecil.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penerimaan negara dari sub sektor migas di wilayah kewenangan Aceh pada tahun 2023 sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan HGBT yang sudah

diterapkan sejak tahun 2020. Pada tahun 2023 ini penerimaan negara turun dari angka US\$13,86 Juta menjadi US\$10,54 Juta setelah *keptwhole*. Mekanisme *keptwhole* adalah upaya atau komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keekonomian KKKS setelah penerapan kebijakan HGBT, yaitu dengan mengambil sebagian atau seluruh penerimaan negara bukan pajak dari bagian penjualan gas untuk diberikan kepada KKKS untuk menutupi kekurangan penerimaan mereka akibat penerapan HGBT. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi bahwa perlu mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu, sehingga telah ditetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Kebijakan HGBT tersebut adalah upaya Pemerintah untuk mendukung perkembangan industri sektor hilir yaitu dengan cara menetapkan suatu harga yang dianggap cukup baik demi memajukan kegiatan usaha pada beberapa kelompok industri hilir. Di saat yang bersamaan penetapan harga sektor hilir ini juga dipastikan tidak akan mengganggu keekonomian lapangan pada industri hulu migas.

Angka penerimaan negara setelah *keptwhole* sebesar US\$10,54 Juta ini terdiri dari penerimaan negara dari penjualan kondensat sebesar US\$6,33 Juta dan dari penjualan gas bumi sebesar US\$4,21 Juta. Tanpa memperhitungkan tambahan PNB dari *signature bonus*, penerimaan negara tahun 2023 lebih kecil dari target PK dimana hal ini disebabkan oleh lebih kecilnya ICP rata-rata tahun 2023, di angka 78,43 US\$/barel, dibanding dengan asumsi ICP pada RKA 2023 sebesar 92,2 US\$/barel. Realisasi penerimaan negara ikut terdongkrak naik setelah digabungkan dengan PNB dari *signature bonus* sebesar US\$1,1 Juta.

Penerimaan negara di wilayah Aceh untuk tahun 2022 adalah sebesar US\$16,25 Juta, artinya terjadi penurunan penerimaan negara sebesar US\$1,29 Juta menjadi US\$14,96 Juta di tahun 2023. Hasil ini dipengaruhi oleh penurunan ICP sebesar 19,17% dari tahun sebelumnya, dimana di tahun 2022 di rata-rata 97,03 US\$/bbl menjadi rata-rata 78,43 US\$/bbl di tahun 2023. Selain itu penurunan penerimaan negara ini juga dipengaruhi oleh tingkat produksi/*lifting* migas yang cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor migas secara nasional di tahun 2023, yaitu di angka US\$14,59 Miliar, kontribusi dari subsektor migas Aceh adalah 0,072% capaian nasional.

Berikut adalah tabel ikhtisar realisasi hasil kegiatan hulu migas tahun 2023.

Tabel 17 Ikhtisar Realisasi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2023 – Minyak Bumi/ Kondensat

OIL	SATUAN	PGE	MEDCO	TOTAL
Produksi	mbbl	322	385	707
Lifting	mbbl	312	374	686
Gross Revenue	Ribu USD	21.845	26.222	48.067

Cost Recovery	Ribu USD	17.476	20.978	38.454
Investment Credit	Ribu USD	-	-	-
Pph Migas	Ribu USD	-	-	-
PNBP	Ribu USD	2.199	4.128	6.327
Pendapatan Bagian Negara	Ribu USD	2.199	4.128	6.327
Pendapatan KKKS (Nett)	Ribu USD	19.854	22.094	41.948

*Data dari Financial Quarter Report Q4 2023

Tabel 18 Ikhtisar Realisasi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2023 – Gas Bumi

GAS	SATUAN	PGE	MEDCO	TPI	TOTAL
Produksi	mmscf	16.205	16.803	265	33.273
Lifting	mmscf	6.150	11.072	185	17.407
Gross Revenue	Ribu USD	39.756	75.423	1.610	116.789
Cost Recovery	Ribu USD	31.804	63.189	1.288	96.281
Investment Credit	Ribu USD	-	-	-	-
Pph Migas	Ribu USD	-	-	-	-
PNBP	Ribu USD	2.339	1.703	166	4.208
Pendapatan Bagian Negara	Ribu USD	2.339	1.703	166	4.208
Pendapatan KKKS (Nett)	Ribu USD	37.417	73.721	1.444	112.582

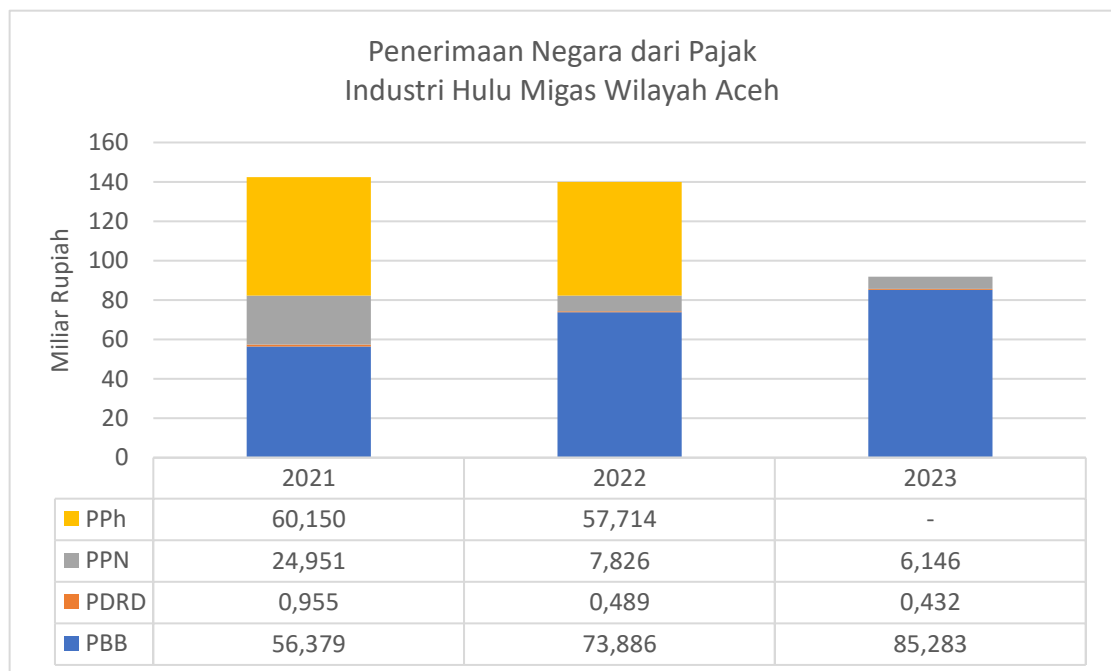
*Data dari Financial Quarter Report Q4 2023

Terkait penurunan target PK BPMA dari target Renstra BPMA tahun 2023 dapat dijelaskan bahwasanya terjadi perubahan kondisi dan strategi hulu migas di wilayah kewenangan Aceh, diantaranya:

1. Perubahan harga gas Blok "A" dari awalnya 9,45 US\$/boe menjadi 7.03 US\$/boe, yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan HGBT berakibat pada penurunan kembali harga gas menjadi 6,56 US\$/boe.
2. Penerapan HGBT tersebut juga berlaku untuk KKKS eksploitasi lainnya di wilayah kewenangan Aceh. Kebijakan ini mengharuskan Pemerintah untuk menerapkan skema *kepthwhole*, di mana bagian pendapatan negara dari penjualan gas harus diberikan kepada KKKS untuk menutupi kekurangan penerimaan mereka mengacu pada harga gas sesuai Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG").
3. Identifikasi laju penurunan produksi Blok "A" yang lebih tinggi dari perkiraan awal untuk Lapangan Arus Siwah yang menyebabkan terjadi perubahan strategi pengembangan lapangan Blok "A".
4. Produksi dari Lapangan Alur Rambung WK Blok "A" harus dihentikan untuk sementara waktu karena *water production problem*.
5. Identifikasi produksi Julu Rayeu untuk keperluan fuel gas, dimana lebih kecil dibandingkan dengan prediksi awal sehingga untuk mengisi kebutuhan fuel gas di Blok "A" maka sebagian sales gas dari Alur Siwah dialih gunakan menjadi fuel gas.
6. Alih Kelola WK "B" dari PHE NSB kepada PGE yang menyebabkan perubahan strategi eksplorasi dan pengembangan lapangan yang berdampak juga pada jumlah anggaran yang akan diinvestasikan.

KONTRIBUSI SEKTOR HULU MIGAS WILAYAH ACEH PADA PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK

Sepanjang tahun 2023 BPMA melakukan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mendorong KKKS di wilayah kewenangan Aceh dalam hal kewajiban pelunasan pajak. Kontribusi sektor hulu migas wilayah kewenangan Aceh pada penerimaan negara dari bagian pajak dengan total Rp91,86 Miliar dengan rincian antara lain dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp85,28 Miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp6,15 Miliar, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Rp0,432 Miliar. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan Badan (PPh) di tahun 2023 tidak ada penagihan dikarenakan pada semua KKKS porsi *Unrecovered Cost* masih lebih besar dari kumulatif *First Tranche Petroleum* sehingga terjadi penundaan penagihan PPh. Total penerimaan negara dari sektor pajak hulu migas di tahun 2023 tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 pada angka Rp139,92 Miliar. Penurunan ini terjadi cukup signifikan pada PPh, meskipun di sisi lain PDRD dan PPN juga mengalami penurunan. Hanya pajak dari PBB yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. PDRD sendiri baru mulai adanya tagihan di tahun 2022, sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 tentang Sumber Tenaga Listrik sebagai Objek Pajak Penerangan Jalan, maka untuk masa (periode pemakaian listrik) sampai dengan 13 Desember 2021 Pemerintah Daerah tidak dapat menagihkan PPJ (Pajak Penerangan Jalan non PLN).



Gambar 23 Penerimaan Negara dari Pajak pada Industri Hulu Migas Aceh

DANA BAGI HASIL DAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL DARI INDUSTRI HULU MIGAS WILAYAH ACEH

Aceh, dengan landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ("UU No. 11 Tahun 2006"), memiliki peran yang khusus dalam sistem otonomi daerah di Indonesia. Keistimewaan Aceh tidak hanya tercermin dalam hak otonomi yang luas, tetapi juga dalam alokasi dana yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

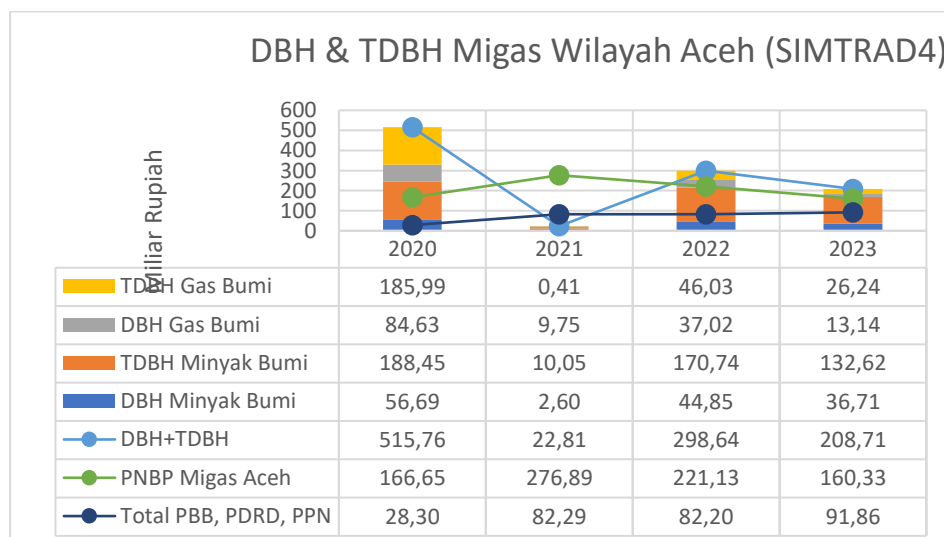
Dari sektor migas, selain mendapatkan Dana Bagi Hasil (“DBH”) dengan besaran yang sebanding dengan provinsi lainnya, Aceh juga memperoleh Tambahan Dana Bagi Hasil (“TDBH”). Keistimewaan ini tidak diperoleh oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat.

DBH migas adalah dana yang berasal dari pendapatan negara yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas bumi di wilayah kabupaten/kota maupun provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi biaya pajak dan komponen lainnya. Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf b angka 5) dan 6) dalam UU No. 11 Tahun 2006, yang menetapkan keistimewaan Aceh dalam pembagian hasil migas, Aceh menerima 15% dari eksploitasi minyak bumi Aceh, dan 30% dari eksploitasi gas bumi Aceh.

Selain DBH migas, Aceh, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (3) huruf a dan huruf b dari UU No. 11 Tahun 2006, juga memperoleh Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (TDBH SDA Migas) dengan proporsi eksploitasi minyak bumi Aceh memberikan alokasi sebesar 55% dan gas bumi Aceh dengan alokasi sebesar 40%.

Kedua pendapatan tersebut digabungkan dalam Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (DBH SDA Migas). Semakin besar produksi yang dihasilkan, semakin besar juga penerimaan yang diperoleh oleh Aceh. Dengan memanfaatkan dengan baik kekhususan yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2006, Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta pengembangan ekonomi yang inklusif.

Berikut adalah grafik DBH dan TDBH Aceh sampai dengan tahun 2023 (sumber: Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa; SIMTRAD4, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan):



Gambar 24 PNPB Migas, Pajak, DBH & TDBH Migas wilayah Aceh

ANGGARAN ABANDONMENT & SITE RESTORATION DAN PEMANFAATAN BANK LOKAL

Pada kegiatan hulu migas di wilayah Aceh pencadangan Dana *Abandonment and Site Restoration* ("ASR") bersumber dari WK "B" dan Blok "A" Aceh, di mana WK "B" mulai mencadangkan sejak 2016 sampai dengan semester II 2023 dengan total sebesar US\$15,395 juta, sementara itu Blok "A" Aceh sudah melakukan kewajiban finansial ASR sejak semester I 2021 hingga semester II 2023 dengan kumulatif sebesar US\$1,994 juta. Sehingga total dana ASR WK Aceh sebesar US\$17,38 juta. Perkembangan dana ASR dari WK PASE sudah disepakati sejak November 2023 dan akan mulai dicadangkan pada 2024 sebesar US\$0,399 juta.

Dana ASR tersebut disimpan di Bank Umum Pemerintah Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia ("BSI") dan Bank Mandiri, sebagai dukungan terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

REKOMENDASI LEGALITAS KOMERSIALISASI

a. Legalitas Komersialisasi Minyak Mentah/Kondensat dan Produk Ikutan

Pada Tahun 2023 BPMA bersama KKKS dari WK "B" dan WK Blok "A" Aceh telah menyepakati skema komersialisasi ENTIK, dimana seluruh Kondensat yang diproduksi dari kedua, termasuk kondensat bagian negara, dimonetisasi untuk tujuan ekspor dengan formula harga premium sebesar ICP + 1,1 USD/bbl. Skema monetisasi dan penjualan ekspor ini diproyeksikan dapat memberikan tambahan penerimaan hingga USD 730 ribu pada Tahun 2024 sehingga penerimaan negara yang didapat dari kegiatan hulu kedua WK tersebut menjadi lebih optimal.

Melanjutkan strategi optimasi biaya handling sulfur dari WK Blok "A" Aceh, BPMA dan KKKS Medco E&P Malaka telah berhasil melakukan perpindahan titik serah sulfur WK Blok "A" Aceh, dari yang sebelumnya terletak di fasilitas Point B Kilang Arun menjadi FOT CPP Medco E&P Malaka. Strategi monetisasi sulfur ini diproyeksikan dapat menekan biaya operasi yang ditimbulkan sehubungan dengan kegiatan handling sulfur hingga USD 800 ribu per tahunnya dari WK Blok "A" Aceh.

b. Legalitas Komersialisasi Gas Bumi

Pada awal tahun 2023, Menteri telah menerbitkan penetapan harga gas bumi untuk WK "B" dengan skema 2 (dua) tier Harga Gas Bumi sebagaimana rekomendasi BPMA di Tahun 2022 demi memberikan penerimaan negara yang optimal. Untuk memastikan implementasi harga gas bumi, kelancaran pasokan dan jaminan penyerapan oleh para pembeli gas bumi, BPMA memastikan penyelesaian seluruh Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang ditandai dengan penandatanganan PJBG antara KKKS PGE dan PGN Grup.

Pada tahun 2023 juga, BPMA melaksanakan Analisa dan Evaluasi terkait pemanfaatan 2 (dua) alokasi gas bumi dari dua WK di Aceh, yaitu WK Pase dan WK "B", termasuk alokasi jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Pada alokasi jargas kota medan, Menteri ESDM

telah menetapkan perubahan alokasi dari yang semula dipasok melalui gas bumi WK Pase menjadi WK "B". Perubahan alokasi ini didasarkan pada rekomendasi BPMA yang telah mengevaluasi kemampuan dan optimasi penerimaan negara dari WK Pase dan WK "B", sehingga perubahan pasokan dari yang semula disalurkan oleh KKKS TPI dari WK Pase diberikan kepada KKKS PGE dari WK "B" sehingga memberikan penerimaan negara yang optimal dan menjaga keekonomian KKKS TPI yang marjinal.

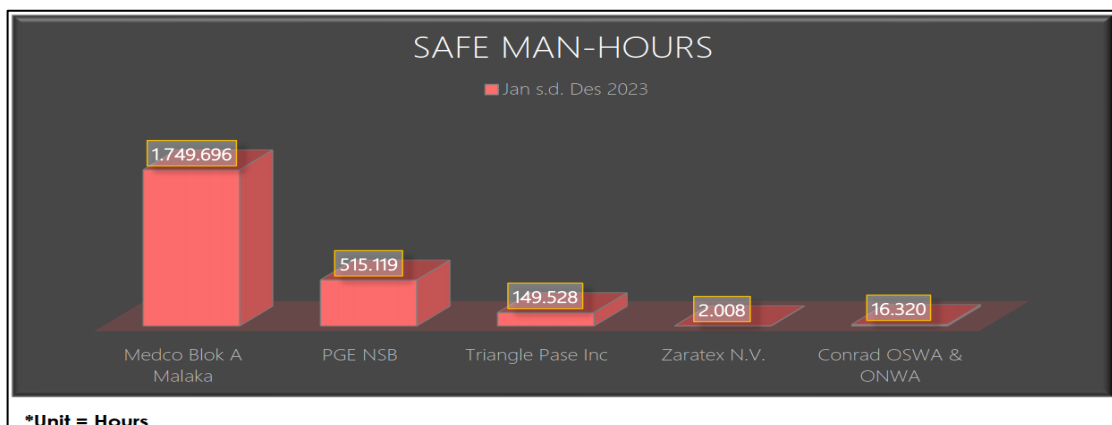
Evaluasi alokasi lainnya yang dilakukan BPMA pada tahun 2023 adalah perpanjangan alokasi gas bumi dari WK "B" untuk pemanfaatan industri dan Pupuk. BPMA dan KKKS telah memulai proses pengajuan alokasi untuk periode 2024 – 2028 dengan memprioritaskan pemanfaatan Pupuk. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam prioritas pemanfaatan gas bumi nasional. Melalui usulan alokasi terkini, BPMA dan KKKS PGE telah menyepakati untuk menetapkan suatu batas komitmen penyerapan gas bumi konsumen dengan skema *Take or Pay*. Melalui skema ini, penerimaan negara dapat terjaga karena adanya komitmen penyerapan oleh Pembeli Gas Bumi. Diharapkan Alokasi Gas Bumi WK "B" periode 2024 – 2028 dapat ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Menteri ESDM pada Tahun 2024 ini.

SASARAN PROGRAM 3: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BPMA YANG EFEKTIF

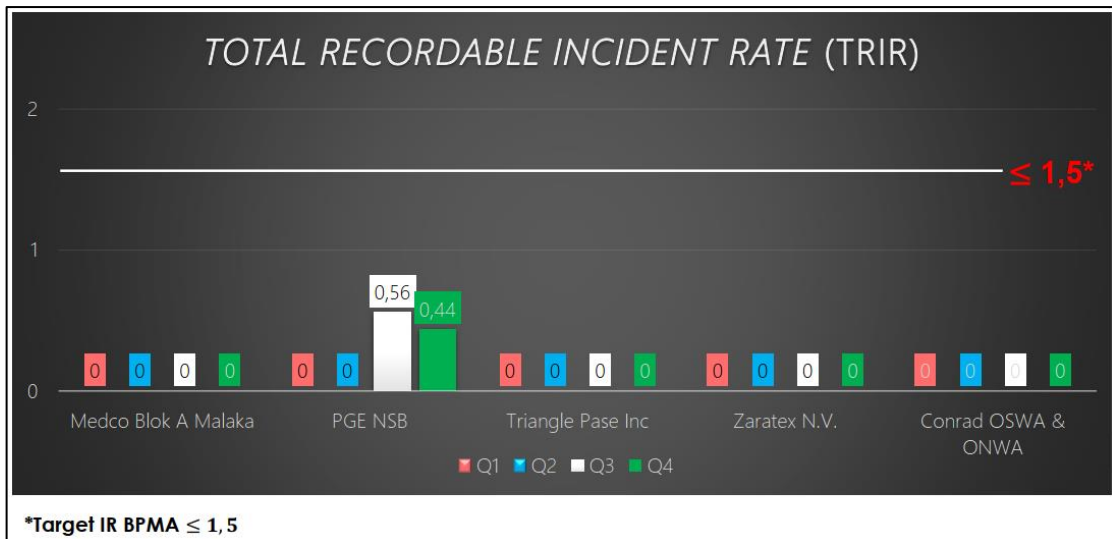
Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 3 adalah:

F. INCIDENT RATE KECELAKAAN KERJA KEGIATAN HULU MIGAS

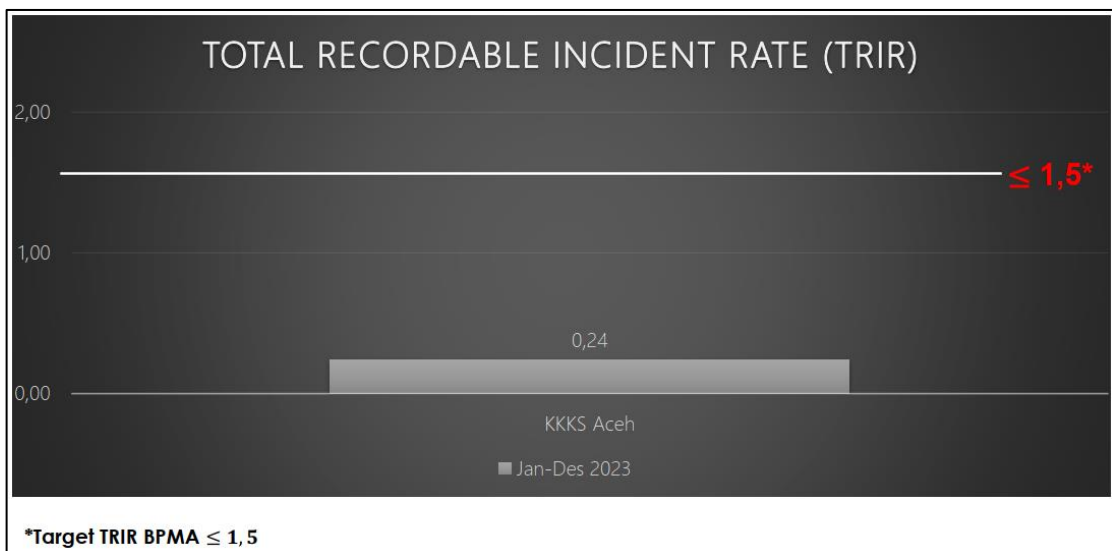
TRIR adalah jumlah *recordable incident* dikali 1.000.000 dan dibagi jumlah *manhours* pada semua KKKS produksi. Target *Total Recordable Incident Rate* ("TRIR") kegiatan hulu migas pada PK tahun 2023 adalah pada nilai ambang batas 1,5 dengan satuan Indeks, sedangkan target pada Renstra adalah dengan nilai ambang batas 1, dimana kenaikan target ambang batas ini karena mempertimbangkan padatnya kegiatan hulu migas di tahun 2023 ini, diantara kegiatan major antara lain adalah pemboran sumur A-55A dan kegiatan akuisisi 3D *Seismic* seluas 250 km² di WK "B".



Gambar 25 Safe Man-Hours sepanjang tahun 2023 untuk kegiatan hulu migas wilayah Aceh



Gambar 26 TRIR BPMA dan setiap KKKS wilayah Aceh sepanjang tahun 2023



Gambar 27 TRIR sepanjang tahun 2023 untuk kegiatan hulu migas wilayah Aceh

Upaya-upaya yang direncanakan untuk mencapai target tersebut meliputi pemantauan kegiatan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan ("K3LL") dan *compliance* diantaranya dengan melakukan reviu berdasarkan Laporan Bulanan K3LL dari KKKS, melakukan koordinasi dan kunjungan ke lapangan.

Berdasarkan Laporan bulanan yang dikirimkan KKKS pada tahun 2023 terdapat satu kasus *Lost Time Injury* di WK "B" Aceh sehingga Indeks TRIR pada tahun 2023 sebesar 0,24. Capaian ini sedikit di atas capaian tahun 2022 dimana Indeks TRIR yang didapat adalah 0,295. Jika dibandingkan *Indeks Incident Rate* nasional tahun 2023 pada industri hulu migas adalah juga pada angka 0,24 dengan jumlah *Manhours* 330 juta jam. Sebagai informasi *incident rate* hulu migas di Indonesia pada tahun 2023 masih dibawah rata-rata *incident rate* perusahaan migas dunia pada angka 0,90.

Tabel 19 Kompilasi HSE performance BPMA & KKKS wilayah Aceh tahun 2023

No	LEADING INDICATOR	JUMLAH	KETERANGAN
1	Total Man-Hours Worked	4.218.385	Hours
2	Save Man-Hours Worked	2.432.671	Hours
No	LAGGING INDICATOR	JUMLAH	KETERANGAN
1	Case of Accident	1	Case
2	Total Recordable Accident	1	LTI
3	Total Recordable Injury Rate (TRIR)	0,24	All K3S
4	Oil Spill \geq 15 Barel / Major Gas Leak	0	Nihil
5	Property Damage	0	Nihil

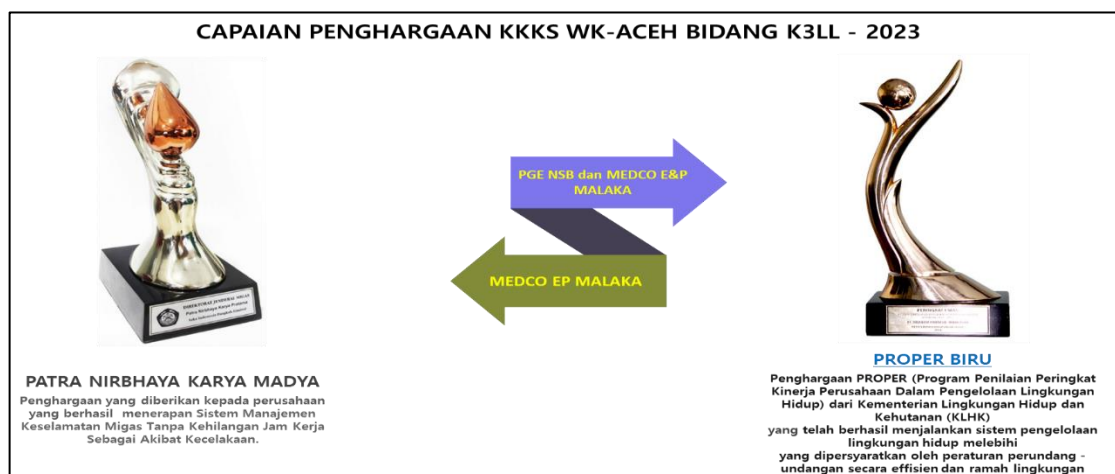
Note:

- LTI : Lose Time Injury
- Terjadi LTI di K3S PT Pema Global Energi di 28 Agustus 2023

BPMA bersama KKKS aktif melakukan pengawasan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan meminimalisir terjadinya dampak terhadap lingkungan dalam menjalankan kegiatan hulu migas di wilayah kewenangan aceh. Surat Edaran Kepala BPMA dan Pakta Komitmen para pimpinan tertinggi KKKS bersama Deputi Operasi BPMA terkait implementasi Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Lindungan Lingkungan menjadi pondasi dalam perencanaan yang efektif dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai K3LL guna mewujudkan kehandalan dan keberlangsungan operasi dalam melaksanakan kegiatan hulu migas di wilayah kewenangan Aceh.

BPMA bersama KKKS terus menggali peluang perbaikan dalam mengawasi dan/atau memitigasi risiko potensial yang mungkin terjadi di kegiatan hulu migas wilayah kewenangan Aceh. Oleh sebabnya, menjelang akhir tahun 2023 BPMA berinisiatif mengadakan forum diskusi bersama KKKS terkait pembentukan *Integrated Emergency Response Team* (IERT). Dengan pembentukan IERT diharapkan seluruh KKKS yang berada di wilayah kewenangan Aceh dapat saling terhubung dan membantu sehingga penanganan kasus kedaruratan migas dapat ditangani dengan cepat dan komperhensif.

BPMA bersama KKKS juga aktif melakukan *stakeholder engagement* dalam upaya menggali aspirasi dan ekspektasi stakeholder terhadap implementasi K3LL yang diharapkan sesuai dengan regulasi dan ketentuan baik yang berlaku dan/atau perubahannya.



Gambar 28 Penghargaan Bidang K3LL bagi KKKS di Wilayah Kewenangan Aceh

Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) KKKS di wilayah kewenangan Aceh yaitu KKKS PGE dan PT Medco E&P Malaka yang mendapatkan predikat biru pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Ini merupakan sebuah pencapaian dan peningkatan kinerja bidang lingkungan yang mana di tahun 2022 hanya 1 (satu) KKKS saja yang mendapatkan predikat PROPER Biru yaitu PGE selaku operator Blok Migas WK "B". Tahun 2023 merupakan tahun pertama bagi PT Medco E&P Malaka mengikuti PROPER dan dengan kerjasama serta dukungan dan koordinasi antar stakeholder yang baik, PT Medco E&P Malaka dapat memenuhi seluruh ketentuan regulasi lingkungan yang dipersyaratkan sehingga PROPER Biru dapat dicapai di tahun 2023.

SASARAN PROGRAM 4: TERSEDIAANYA PERENCANAAN YANG BERKUALITAS

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 4 adalah:

G. INDEKS KUALITAS PERENCANAAN BPMA

Perencanaan organisasi merupakan salah satu unsur dari manajemen dan kinerja organisasi dimana perencanaan organisasi adalah suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan capaian hasil organisasi dengan rencana organisasi yang telah ditetapkan, serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Indikator yang menggambarkan tercapainya kegiatan ke-4 adalah Indeks kualitas perencanaan BPMA yang ditargetkan pada tahun 2023 BPMA mendapatkan indeks 84,69 dari target 85 dimana capaian tahun 2022 BPMA dapat meraih indeks 85,1.

Adapun metode penilaian adalah dengan menggunakan matrix penilaian yang berisikan indikator dan parameter-parameter yang berkaitan dengan perencanaan dan pelayanan internal di dalam organisasi BPMA, termasuk di antaranya adalah perencanaan aspek pelayanan hukum, media relations, keprotokolan pimpinan BPMA, manajemen perkantoran dan layanan data dan informasi.

LAYANAN HUKUM

Dalam memberikan dukungan administrasi terkait hukum, fungsi layanan hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan pendampingan hukum, bantuan hukum, penelaahan dan pengkajian hukum kepada BPMA, pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan hukum di Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"). Beberapa rincian pelaksanaan layanan aspek hukum kontrak komersial dan perundangan pada tahun 2023:

1. Penyusunan KKS yang telah ditandatangani pada tahun 2023 untuk WK ONWA (Singkil), OSWA (Meulaboh) dan Bireun Sigli.
2. Penyusunan Kontrak-Kontrak Komersial yang dilaksanakan pada tahun 2023. Beberapa di antaranya adalah Perjanjian Jual Beli Gas antara PGE - PGN PTGN untuk WK "B", Perjanjian

Rekening Bersama Abandonment and Site Restoration WK "B" dan Nota Kesepahaman BPMA dengan instansi/badan pemerintah lainnya, dan lain-lain.

3. Pemberian pertimbangan hukum di lingkungan BPMA maupun bagi KKKS di wilayah Aceh. Beberapa di antaranya adalah terkait monetisasi jual beli gas antara PGE – PGN PTGN untuk WK "B", pembahasan status monetisasi kondensat WK Pase, kajian formula signature bonus kepada DJKN Kementerian Keuangan, terkait hibah BMN Hulu Migas dalam PMK 140/PMK.06/2020 terkait BMN Hulu Migas dengan ketentuan dalam PP 23/2015, dan pertimbangan hukum lainnya.
4. Pemberian pertimbangan terkait penyusunan dan pengkajian regulasi dan perundangan. Beberapa di antaranya adalah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi, Regulasi terkait dengan Pertambangan Minyak Rakyat di Aceh, Peraturan Kepala terkait Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara/Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara, Rancangan Permen ESDM terkait dengan implementasi Pasal 77 PP 23 Tahun 2015, dan Permen ESDM terkait dengan PNBP Migas (Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi).

LAYANAN DATA DAN INFORMASI

Pelayanan data dan informasi merupakan poin krusial dalam mendukung operasional BPMA selama tahun 2023. Tantangan utama yang dihadapi yaitu terkait alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional terutama terkait lisensi perangkat lunak yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap fungsi di BPMA.

Beberapa capaian yang diraih selama tahun 2023 antara lain:

1. Pengembangan Aplikasi Fleet yaitu aplikasi yang berfungsi untuk memantau permintaan penggunaan kendaraan operasional dan konsumsi bahan bakar di BPMA.
2. Peningkatan dan perbaikan aplikasi eSPPD (versi 1.9), dimana banyak perbaikan dari sisi proses dan fitur untuk mempermudah dalam mengelola data dan dokumen perjalanan dinas BPMA.
3. Peningkatan dan perbaikan aplikasi Naskah Dinas (NADINE BPMA), dimana penambahan beberapa fitur yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dan masukan dari pengguna.
4. Pengembangan *Dashboard Monitoring* Benefit Kesehatan BPMA, dimana dashboard ini membantu Manajemen BPMA dan fungsi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan benefit kesehatan, termasuk di dalamnya terdapat komponen biaya dan serapan anggaran serta trend diagnosa.

Selain dari pencapaian utama di atas, untuk meningkatkan kualitas layanan data dan informasi, beberapa inisiasi telah dilakukan, diantaranya adalah koordinasi antar K/L seperti pembaharuan MoU antara BPMA dan Badan Siber dan Sandi Negara ("BSSN"), serta kegiatan workshop

arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("SPBE") untuk mempersiapkan proyek strategis BPMA pada tahun 2024 yaitu Penyusunan Arsitektur SPBE BPMA.

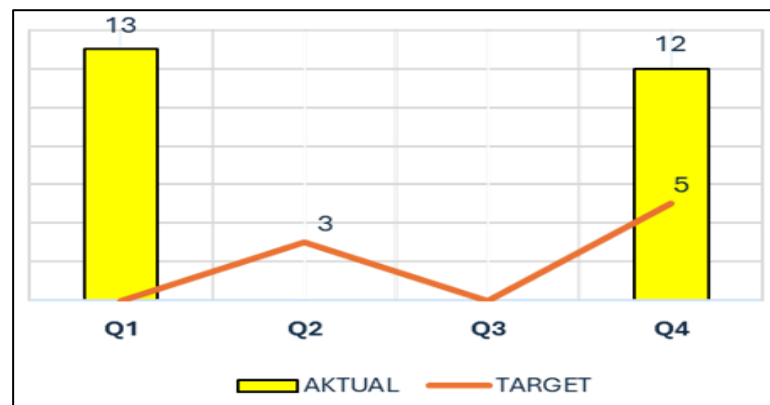
SASARAN PROGRAM 5: ORGANISASI YANG FIT DAN SDM YANG UNGGUL

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 5 adalah:

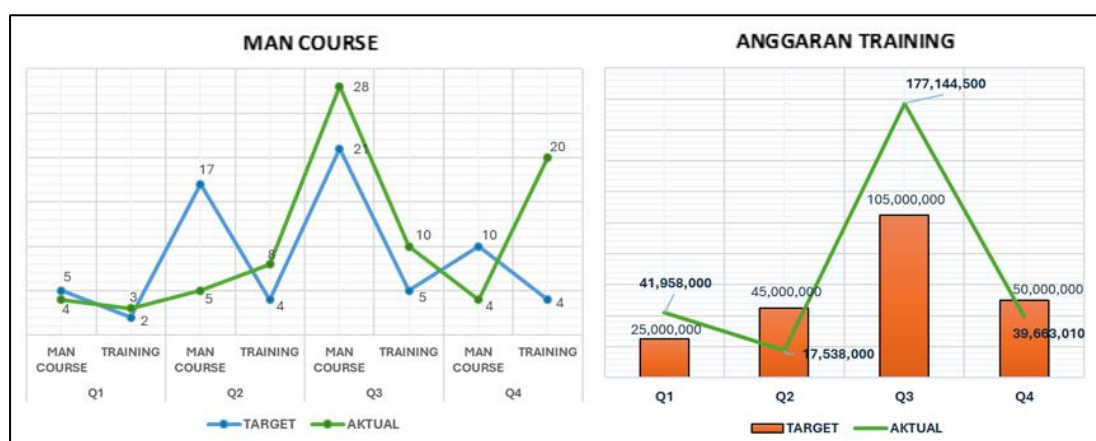
H. PERSENTASE PEKERJA BPMA YANG MEMENUHI KUALITAS SESUAI PORSI JABATAN

Tahun 2023 Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum BPMA menargetkan persentase kualifikasi SDM BPMA pada angka 90%, dan realisasi yang diraih untuk tahun 2023 mencapai 95,12%. Angka realisasi ini juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra BPMA tahun 2023, yaitu di angka 90%, namun sedikit di bawah capaian tahun 2022 yang mampu meraih realisasi di angka 96%.

Pengembangan SDM BPMA di tahun 2023 dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui pelaksanaan rotasi terhadap pegawai antar kedivisi/ke deputian dan melalui program sertifikasi/pelatihan.



Gambar 29 Target perencanaan kegiatan rotasi pegawai dan aktual realisasi di tahun 2023



Gambar 30 Perbandingan target dan aktual realisasi pada kegiatan sertifikasi/training pegawai BPMA di tahun 2023

Tahun 2023, BPMA telah mengikutsertakan 49 pegawai BPMA untuk sertifikasi dan pelatihan-pelatihan profesional lainnya khususnya di bidang-bidang pekerjaan pegawai BPMA yang ada saat ini dengan total budget Rp. 326,086,572 (realisasi 99,64%).

Pengembangan kompetensi dan karir Pegawai BPMA di tahun 2023 lebih mengutamakan sertifikasi di bidang profesi masing-masing jabatan pegawai. Tahun 2023 seluruh pegawai BPMA yang berlatar belakang pendidikan teknik dan saat ini bekerja di bidang keteknikan telah tersertifikasi Profesi Insinyur (PPI) sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran dimana didalamnya mengatur tentang kewajiban bagi pekerja dibidang teknik untuk memiliki Sertifikasi Profesi Insinyur. BPMA juga mengikutsertakan mereka yang sudah lulus profesi Insinyur untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur ("STRI") sesuai dengan tingkat keahlian nya saat ini.

SASARAN PROGRAM 6: PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BPMA YANG EFEKTIF (INTERNAL)

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 6 adalah:

I. NILAI SAKIP BPMA

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Pengelola Migas Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 5 tersebut diuraikan bahwa SAKIP mencakup beberapa aspek kunci, seperti perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta peninjauan dan evaluasi kinerja.

Dalam prakteknya, SAKIP untuk unit Eselon I di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dievaluasi oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM. Evaluasi ini menggunakan Lembar Kerja Evaluasi ("LKE") yang disusun berdasarkan Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan KESDM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Implementasi SAKIP di Badan Pengelola Migas Aceh diukur berdasarkan lima komponen, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Pada tahun 2023, Tim Inspektorat Jenderal KESDM mengevaluasi implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya, yaitu 2022. Hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 73,95, melebihi target sebesar 70, sehingga BPMA meraih capaian kinerja sebesar 105,64%. Hal ini menandakan bahwa BPMA telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam implementasi SAKIP, mengingat statusnya yang masih baru. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra BPMA sebesar 85, realisasi di tahun 2023 masih di bawah target tersebut.

Tabel 20 Penilaian SAKIP BPMA tahun 2023

KOMPONEN	BOBOT	NILAI EVALUASI
Perencanaan Kinerja	30	24,6
Pengukuran Kinerja	30	21,60
Pelaporan Kinerja	15	9,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	73,95

SASARAN PROGRAM 7: PENGELOLAAN SISTEM ANGGARAN YANG OPTIMAL

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 7 adalah:


J. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPMA

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA TA 2023 sampai dengan periode Desember adalah sebesar 94,42%, lebih tinggi dari target IKPA berdasarkan Indikator Sasaran Program BPMA Tahun 2022 adalah sebesar 93,5%.

Dibandingkan dengan tahun 2022, nilai IKPA BPMA tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,31% dari angka 95,73%. Upaya-upaya peningkatan terus dilakukan antara lain dengan selalu mematuhi batas waktu pelaksanaan yang telah disyaratkan dalam setiap indikatornya, diantaranya pada indikator Capaian Output, Pengelolaan UP dan TUP dan Belanja Kontraktual. Berikut adalah table penilaian IKPA 2023 BPMA:

Tabel 21 Penilaian IKPA BPMA tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	020	447030	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	Nilai	100.00	73.60	91.01	98.21	92.59	97.76	100.00	100.00	94.42	100%	94.42
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.36	18.20	9.82	9.26	9.78	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.80			95.91				100.00			

Berikut ini rincian bobot penilaian dari 3 (tiga) aspek dalam parameter IKPA:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
 - 1) Revisi DIPA : 10 dari 10 (Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA : 7,36 dari 10 (Dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan)
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
 - 1) Penyerapan Anggaran : 18,20 dari 20 (Dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan)
 - 2) Belanja Kontraktual : 9,82 dari 10
 - 3) Penyelesaian Tagihan : 9,26 dari 10 (Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN)
 - 4) Pengelolaan UP dan TUP : 9,78 dari 10 (Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai)
 - 5) Dispensasi SPM : 5 dari 5 (Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran)
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
 - 1) Capaian Output : 25 dari 25 (Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan)

Nilai capaian IKPA BPMA masih relatif rendah adalah pada nilai indikator deviasi halaman III DIPA (7,36 dari 10). Deviasi halaman III DIPA mengatur tentang capaian serapan anggaran dari sisi pembayaran renumerasi pada setiap Triwulan. Rendahnya indikator tersebut salah satu hambatan nya adalah Realisasi Anggaran belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana/Kas. Hal ini disebabkan karena mekanisme Pembayaran Remunerasi Pegawai BPMA dilakukan setiap akhir bulan berjalan (dibayarkan setelah bekerja), sehingga Realisasi Anggaran baru menjadi SP2D di bulan berikutnya. Ini yang menjadikan Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA tidak sesuai dengan Realisasi Anggaran. Untuk mencapai target nilai capaian IKPA BPMA yang lebih baik, maka poin tersebut diatas akan menjadi perhatian penting dalam peningkatan kinerja pada tahun ke depannya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, alokasi pagu anggaran BPMA sebesar Rp78,93 Miliar, yang kemudian direvisi menjadi Rp80,84 Miliar dengan realisasi mencapai 98,39% atau sebesar Rp79,54 Miliar dimana pemanfaatan anggaran tersebut merupakan upaya untuk mencapai target kinerja BPMA 2023 yang mencapai rata-rata 111,69%. Berikut adalah realisasi anggaran belanja BPMA Tahun 2023:

Tabel 22 Realisasi Anggaran Belanja BPMA tahun 2023 untuk setiap jenis belanja

JENIS BELANJA	PAGU & REALISASI 31 DESEMBER 2023			
	PAGU	REALISASI	SISA	%
Belanja Pegawai	54.543.169.000	53.351.355.142	1.191.813.858	97,81%
Belanja Barang/Jasa	25.945.675.000	25.848.340.048	97.334.952	99,62%
Belanja Modal	347.479.000	337.300.000	10.179.000	97,07%
Total	80.836.323.000	79.536.995.190	1.299.327.810	98,39%

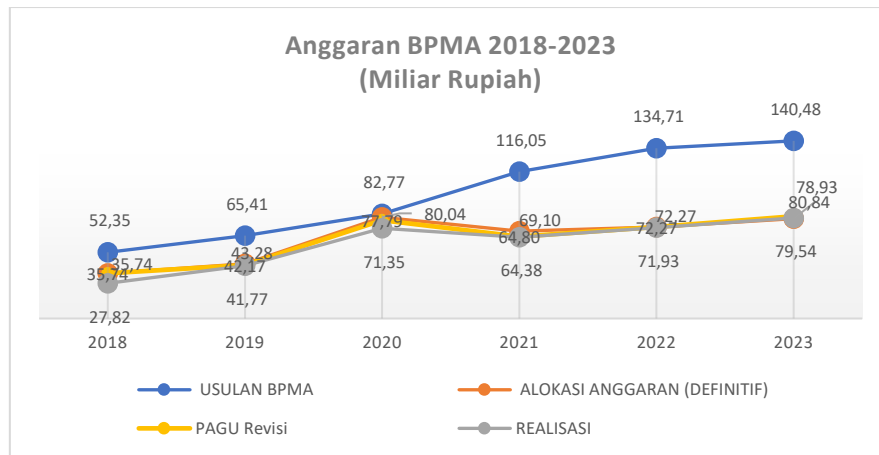
Pada umumnya, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai akan mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian serapan anggaran BPMA tahun 2023 adalah sebesar 98,39% dimana sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 pada angka 99,52%. Disisi lain capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 111,69%, meningkat sebanyak 7,2% dari tahun 2022. Hasil tersebut tentunya dapat menggambarkan tingkat efisiensi yang sudah dilakukan BPMA dalam meraih capaian kinerja dengan anggaran yang tersedia.

Grafik di bawah ini adalah perbandingan realisasi anggaran dan capaian kinerja dari tahun 2019 s/d 2023 untuk menggambarkan kinerja BPMA yang cukup efisiensi. Tercatat bahwa setiap tahunnya dari 2019 s/d 2023 capaian kinerja BPMA selalu diatas 100% dimana menandakan secara kinerja BPMA sangat efektif. Dan dari sisi serapan anggaran 2019 s/d 2023 hampir mencapai 100%, hanya di tahun 2020 serapan anggaran BPMA mendekati 90%.



Gambar 31 Perbandingan Capaian Kinerja vs Serapan Anggaran BPMA dari tahun 2019 s/d 2023

Perkembangan usulan anggaran, pagu anggaran definitive dan realisasi anggaran BPMA dari tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 32 Usulan, Pagu Anggaran definitive dan realisasi anggaran BPMA dari tahun 2018 s/d 2023

ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya, baik sumber daya keuangan (anggaran) maupun sumber daya manusia. Efisiensi sumber daya direfleksikan masing-masing melalui analisa sebagai berikut:

Analisa Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111,69% dari target, maka dengan capaian realisasi anggaran 98,39% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 13,28% dengan rincian nilai efisiensi untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 23 Perbandingan realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja pada sasaran program, serta analisa efisiensi sumber daya keuangan di tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% REALISASI ANGGARAN & % CAPAIAN OUTPUT	%EFISIENSI
1.	Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	100,48	-0,48
		100	
2.	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak dan Gas Bumi	99,62	6,38
		106	
3.	Produksi Minyak dan Gas Bumi	99,97	-0,28
		99,69	
4.	Komitmen TKDN pada Industri Hulu Migas	99,78	12,33
		112,02	
5.	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	97,30	5,73
		103,03	
6.	Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	99,48	84,25
		184,00	
7.	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA	99,08	0,56
		99,64	
8.	Persentase Pekerja BPMA yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Posisi Jabatan	99,36	6,33
		105,69	

9.	Nilai SAKIP BPMA	99,96	5,68
		105,64	
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	98,29	2,85
		101,14	

%	Realisasi Anggaran	98,39	Efisiensi 13,28%
%	Realisasi Kinerja	111,67	

Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) disainifikasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Analisis efisiensi dilakukan hanya apabila rata-rata capaian sasaran program dan sasaran kegiatan telah (paling tidak) mencapai atau (hingga) melampaui 100%.
2. Apabila rata-rata capaian sasaran program dan sasaran kegiatan yang terkait dengan SDM telah mencapai atau melampaui 100%, dan rata-rata capaian output tersebut lebih tinggi dari capaian anggaran SDM, maka penggunaan anggaran SDM telah efisien.
3. Apabila rata-rata capaian sasaran program dan sasaran kegiatan yang terkait dengan SDM telah mencapai atau melampaui 100%, dan rata-rata capaian output tersebut lebih rendah dari capaian anggaran SDM, maka penggunaan anggaran SDM belum efisien.

Efisiensi SDM ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24 analisa efisiensi sumber daya manusia di tahun 2023

SP	IKU	SK	IKK		CO (%)	RA (%)	RO	KOMPONEN
ORGANISASI YANG FIT DAN SDM YANG UNGGUL	% Pekerja BPMA yg Memenuhi Kualifikasi Sesuai Posisi Jabatan	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	1	Persentase Pekerja BPMA yg mengikuti pelatihan/sertifikasi berdasarkan rencana program kerja pelatihan dan sertifikasi	105,69	99,36	EBC 954 Layanan Manajemen SDM	Pengelolaan Kepegawaian dan SDM
			2	% Tingkat kedisiplinan kehadiran Pekerja BPMA berda-sarkan data absensi Pegawai				
			3	Jumlah maksimal kejadian berhentinya operasi karena permasalahan hubungan industrial				
			4	% Realisasi Pengembangan SDM				

SP : Sasaran Program

SK : Sasaran Kegiatan

CO : Capaian Output

IKU : Indikator Kinerja Utama

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

RA : Realisasi Anggaran

RO : Rincian Output

Dari tabel di atas tercermin bahwa Capaian Output (CO) > Realisasi Anggaran (RA). Dengan demikian efisiensi SDM telah terpenuhi (efisien).

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Capaian Kinerja BPMA tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup baik dibuktikan dengan rata-rata tingkat ketercapaian sasaran di angka 111,69%. Angka capaian ini merupakan perata-rataan dengan dengan metode pembobotan dari 10 Indikator Kinerja Utama, dengan rincian 8 indikator dengan capaian di atas 100% (sangat efektif) dan 2 indikator dengan capaian diantara 80% sampai dengan 100% (efektif). Dari sisi serapan anggaran tahun 2023 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.79.536.995.190,- atau 98,39% dari total pagu setelah revisi sebesar Rp80.836.323.000,-. Kedua hal tersebut dapat menggambarkan tingkat efisiensi kinerja BPMA di tahun 2023 yang cukup baik, meskipun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan industri hulu migas yang diperkirakan akan menjadi tantangan tersendiri di masa yang akan datang.

Industri hulu migas memandang jumlah WK dan besarnya sumber daya dan cadangan sebagai asset yang musti terus ditingkatkan. Seberapa besarnya potensi cadangan dan sumber daya akan menentukan keberlangsungan industri hulu migas sampai masa yang akan datang. Pada tahun 2023 BPMA mengawasi 8 (delapan) KKKS yang mana satu WK telah terminasi, dan terdapat penambahan 3 WK baru. Ke delapan WK tersebut terdiri dari 4 (empat) KKKS Eksplorasi, yaitu Repsol Andaman B.V. di WK Andaman III (terminasi di tahun 2023), ONWA Pte. Ltd. Di WK baru Offshore North West Aceh (Meulaboh), OSWA Pte. Ltd. Di WK baru Offshore South West Aceh (Singkil) dan PT Aceh Energy di WK baru Bireun Sigli, serta 4 (empat) KKKS Eksploitasi, yaitu PT Medco E&P Malaka di WK Blok "A", PT Pema Global Energi di WK "B", Zaratex N.V. di WK Lhokseumawe dan Triangle Pase Inc. di WK Pase. Dalam kaitannya dengan kegiatan eksplorasi dalam upaya pemenuhan Komitmen Pasti pada 3 (tiga) WK baru sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tantangan utama yang selalu dihadapi BPMA yaitu berhubungan dengan anggaran operasional tahunan BPMA yang cukup terbatas.



LAMPIRAN 1

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Teuku Mohamad Faisal
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji untuk mendorong tercapainya target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Banda Aceh, 27 Desember 2022
Pihak Pertama
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Teuku Mohamad Faisal

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Badan Pengelola Migas Aceh
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Persentase <i>Reserves Replacement Ratio</i> untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	1%
		Produksi Minyak & Gas Bumi	18.278,04 BOEPD
		Optimasi <i>Lifting Cost</i> Produksi Minyak & Gas Bumi	17 US\$/boe
		Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	61%
2	Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	14,52 Juta US\$
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	<i>Incident Rate</i> Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	1,5 Fraksi
4	Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA	85
5	Organisasi yang Fit dan SDM BPMA yang Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan	90%
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai Sakip BPMA	70
7	Pengelolaan Sistem Anggaran BPMA yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	93,5

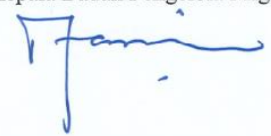
Program : 1. Energi dan Ketenagalistrikan (Rp 3.276.620.000)
2. Dukungan Manajemen (Rp 75.650.944.000)

Jumlah Anggaran : Rp78.927.564.000,-
(Tujuh puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat rupiah)

Pihak kedua
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Arifin Tasrif

Banda Aceh, 27 Desember 2022
Pihak Pertama
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh


Teuku Mohamad Faisal

LAMPIRAN 2

RENCANA KERJA HULU MIGAS WILAYAH ACEH TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023
WK BLOK "A"			
Kegiatan Eksplorasi	Studi G&G	Rencana kegiatan berupa: Field Work untuk mendukung pematangan lead Alur Baong, Drasip & Merbot, serta analisa paleontology dan petrography. Inhouse study pre-development berdasarkan hasil studi pematangan shallow reservoir potensial	<p>Kegiatan Field Work dan inhouse study sudah selesai dilaksanakan dengan output kegiatan Minutes Of Meeting (MOM) dan Laporan Studi.</p> <p>Studi ini merupakan kelanjutan dari pematangan shallow potential berdasarkan data hasil seismic reprocessing post stack enhancement. Dari hasil studi tersebut diharapkan dapat meningkatkan confidence level dari interpretasi seismik pada Struktur Alur Baong, Drasip dan Merbot.</p>
	Survey Lainnya	Kegiatan mitigasi sumur dalam rangka area relinquishment Blok "A"	Sedang dalam proses persiapan pekerjaan. Saat ini difokuskan pada penyelesaian status <i>site restoration</i> pada sumur-sumur tua di area yang akan dilakukan relinquishment
Kegiatan Pengembangan	Pengeboran Sumur	AS-14 & AS-15 Rencana kegiatan berupa: survei lokasi, izin, pembelian LLI material, pembebasan lahan, site construction dan persiapan pengeboran lainnya	Progress kegiatan tahun 2023 Survei Lokasi, Perizinan, Pembebasan lahan, site preparation, proses pengadaan LLI dan Rig 2000HP. Setelah dilakukan evaluasi dan pembahasan aspek subsurface, terdapat perubahan model reservoir yang berimplikasi kepada strategi kegiatan pengeboran dimana rencana awal akan dilakukan pengeboran 2 sumur sekaligus di tahun 2024, menjadi 1 sumur di tahun 2024 dan satu sumur di tahun 2025
	Workover	Workover AS-12 Acid Fracturing & JR-71 perubahan lapisan reservoir	<p>Workover AS-12 Acid Fracturing diundur pengerjaannya ke tahun 2024 dikarenakan alasan dari aspek kehandalan fasilitas produksi, sehingga angka produksi harus dijaga maksimal $\pm 35,5$ MMSCFD.</p> <p>Pindah Lapisan JR-71 juga sampai Q3 2023 belum dilaksanakan dikarenakan permasalahan well integrity sehingga succes ratio menjadi kecil</p>
	Well Service	Kegiatan SBHP AS-11 dan AS-12. Kegiatan ITM	Untuk kegiatan SBHP AS-11 telah dilaksanakan, sedangkan pada AS-12 ditunda sementara waktu dikarenakan adanya isu sosial

RENCANA KERJA HULU MIGAS WILAYAH ACEH TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023
	Fasilitas Produksi	Pengembangan Gas Lapangan Blok "A" Fase II: Cluster D (AS-14) & AS-15, Pre-FEED Pengembangan Gas Lapangan Blok "A" Fase III	<p>Pengembangan Gas Lapangan Blok "A" Fase II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Land Acquisition : Untuk pembebasan lahan AS-15, dari total 8 bidang lahan telah terjadi kesepakatan dan dibayarkan, serta sudah dapat dipakai untuk pekerjaan fisik. Secara parallel masih sedang dilakukan administrasi pengurusan sertifikat. Penyerahan hasil pembebasan lahan dari BPN Aceh Timur ke BPMA telah selesai dilakukan. Detail Engineering : sudah selesai DED dengan PT Synergi untuk AS-15 (progress 100%) & AS-14 (progress 100%). Kontrak : Untuk kontrak Site Prep paket 1 sudah ada dan berlaku. Untuk Site Prep paket 2 diaward ke Maligo, persiapan penandatanganan kontrak. Untuk kontrak Civil, untuk paket 1, sudah di award ke AGM, persiapan penandatanganan kontrak. Sementara untuk paket 2 Civil, telah dilakukan negosiasi komersial, persiapan pengumuman tender. Untuk kontrak EPC, telah diterima 3 RFI dari kontraktor. Melanjutkan proses persiapan tender. Untuk pembelian matting board dilakukan oleh pihak Drilling untuk semua material baik keperluan drilling dan fasilitas, statusnya masih persiapan tender, proses approval internal untuk tender. Pekerjaan Site Prep, paket 1 sudah mulai dilakukan. Telah melakukan Topografi survey dan sedang melakukan Land Clearing dan stripping. <p>Alignment pekerjaan dengan TAR/shutdown : TAR masih sedang berlangsung. Pekerjaan piping (tie in provision), valve integrity dan electrical di Cluster A sudah selesai, proses Leak test masih berlangsung di cluster A, sedang ada kendala dengan kemampuan pompa dari nitrogen isotank. Untuk di CPP, pekerjaan switchgear dan instrument sudah selesai, sementara pekerjaan piping, valve integrity dan Trafo masih berlangsung. Sedang ada</p>

RENCANA KERJA HULU MIGAS WILAYAH ACEH TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023
			kendala kandungan H ₂ S yang masih tinggi.
WK "B"			
Kegiatan Eksplorasi	Pengeboran Sumur	3 Sumur Eksplorasi Arun A-55A, Arun A-72A & Rayeu C-1A	Progress pekerjaan sampai tahun 2023 pengeboran sumur A-55A sudah selesai dilaksanakan sampai TD dan sudah dilakukan well testing dengan hasil gas rate 1,29 MMSCFD dan 169,2 BCPD pada extended flow rate. Untuk 2 sumur lainnya, A-72A dan C-1A, kegiatan akan dialihkan di tahun 2024.
	Studi G&G	Study Core dan Analisa Fluida Arun A-55A, Arun A-72A & Rayeu-C1A	Pada sumur Eksplorasi Arun A-55A, core sampling tidak dapat dilakukan baik dengan metode konvensional maupun sidewall core, sedangkan pengambilan sample fluida sudah dilakukan pada saat kegiatan DST dilakukan untuk kemudian di Studikan dan Analisa Laboratorium
	Survey Seismik	Survey seismik 3D Darat 250 km2 dan data processing	Progress kegiatan akuisisi dan data processing seismik 3D lapangan Arun Overburden dan Rayeu sudah rampung pada Bulan Juni 2023.
Kegiatan Pengembangan	Studi GGR	Study GGR	<ul style="list-style-type: none"> Studi GGR saat ini dalam proses pengerjaan oleh tim LAPI-ITB. Untuk Reservoir Arun & SLS progress kegiatan sudah akan merampungkan pemodelan statik setelah selesainya akuisisi data seismik, dan dilanjutkan dengan pemodelan dinamik. Untuk reservoir-reservoir dengan status eksplorasi, studi tahap geologi sudah rampung dikerjakan. Saat ini akan dilakukan pemodelan statis menggunakan data 3D seismik dari kegiatan akuisisi di WK "B".
	Well Service	SBHP 10 sumur di Lapangan Arun & SLS	Kegiatan SBHP sudah rampung dilaksanakan
	Fasilitas Produksi	Rental <i>Power Plant</i> , Rental <i>Gas Booster Compressor</i> , dan Rental <i>Gas Processing Facility</i> di Cluster IV	<ul style="list-style-type: none"> Power Plant: Overall actual progress (67.25%), kegiatan engineering, main equipment purchase, shipping, and delivery telah selesai. Pekerjaan civil work on progress, dan expediting balance of plant purchase and shop assembly GEG packages. Gas Booster Compressor:

RENCANA KERJA HULU MIGAS WILAYAH ACEH TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023
			<p>Overall actual progress (81.86%), construction civil work/foundation telah selesai, sementara mechanical & piping work, electrical & instrument work masih berprogress. Expediting procurement OSBL materials (electrical, instrument, discharge scrubber and fuel gas system).</p> <ul style="list-style-type: none">Gas Processing Facility: Overall actual progress (0.5%), melanjutkan pekerjaan engineering, yang meliputi topography, soil test, process, dan process safety.
WK PASE			
Kegiatan Eksplorasi	Studi G&G	Study Eksplorasi	Kegiatan study sudah dilakukan Kick Off meeting antara Tim Triangle Pase, Tim LAPI ITB dan BPMA. Scope study meliputi Study Geologi, Geofisika dan Reservoir untuk Lapangan POD Pase A, Pase B dan Lapangan-Lapangan dengan status eksplorasi
Kegiatan Pengembangan	Studi GGR	Study GGR	
WK LHOKSEUMAWE			
Kegiatan Pengembangan	Pre-Development	Lanjutan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Pengembangan Lapangan Gas Peusangan B. Peusangan B gas commercialization and monetization study	<ul style="list-style-type: none">Study AMDAL secara overall 68% progress. K-ANDAL Kegiatan Laut dan RKL-RPL Rinci Kegiatan Darat di KEK ArunStudy gas commercialization sudah rampung dilaksanakan
WK ANDAMAN III			
Kegiatan Eksplorasi	Studi G&G	Study G&G Sample analysis untuk memahami hasil dari sumur Rencong 1X	<p>Studi sudah rampung dilaksanakan. Tujuan dari studi terhadap hasil pengeboran eksplorasi Rencong-1X tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">Mengetahui secara terperinci hasil dari pengeboranMemahami sifat dari penemuanUpdate volumetric prospek RencongMenentukan keekonomian WK Andaman IIISebagai landasan keputusan dan langkah yang akan diambil terhadap WK Andaman III
WK ONWA (MEULABOH)			
Kegiatan Eksplorasi	Studi G&G	Komitmen Pasti Tahun Pertama: Studi G&G Regional, Petroleum System, Inventarisasi & Potensi Lead. Program-program ini sebagai referensi untuk menentukan usulan lokasi seismik 3D	Sedang proses pelaksanaan pekerjaan studi secara in-House

RENCANA KERJA HULU MIGAS WILAYAH ACEH TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023
	Survey Seismik & Survey Lainnya	Program <i>Environmental Baseline Assessment</i> (EBA)	Pelaksanaan pekerjaan studi dilakukan secara in-House dan sudah rampung dilaksanakan
WK OSHA (SINGKIL)			
Kegiatan Eksplorasi	Studi G&G	Komitmen Pasti Tahun Pertama: Studi G&G Regional, Petroleum System, Inventarisasi & Potensi Lead. Program-program ini sebagai referensi untuk menentukan usulan lokasi seismik 3D	Sedang proses pelaksanaan pekerjaan studi secara in-House
	Survey Seismik & Survey Lainnya	Program <i>Environmental Baseline Assessment</i> (EBA)	Pelaksanaan pekerjaan studi dilakukan secara in-House dan sudah rampung dilaksanakan